

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV UNIT KEBUN SEI KOPAS**

LAPORAN

OLEH:

SEPRINDO SIMATUPANG (16.822.0085)
RICKY HARTONO SIAHAAN (16.822.0083)
JUNUS A. SIHOMBING (16.822.0095)



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2019

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV UNIT KEBUN SEI KOPAS**

LAPORAN

OLEH:

SEPRINDO SIMATUPANG	(16.822.0085)
RICKY HARTONO SIAHAAN	(16.822.0083)
JUNUS A. SIHOMBING	(16.822.0095)



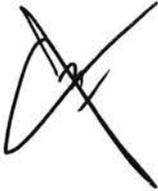
**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi komponen nilai Praktek Kerja Lapangan di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area.

Menyetujui :

Dosen Pembimbing



Muhammad Fadly Abdina. SP, M.Si

Mengetahui Menyetujui
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Medan Area



Dr. Ir. Syahbudin. M.Si

Diperiksa Oleh



Yudi Irfansyah. SP
Asisten Pembimbing Lapangan

Diketahui Oleh



Mugiyanto. SP
Asisten Kepala Tanaman

Disetujui Oleh



Irvan Faisal. SP
Manager Unit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya sampaikan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan karunia yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan “praktek kerja lapangan”. Adapun pembuatan Laporan ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Tugas Akhir dari kampus Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr.Ir.Syabbuddin, M.Si** selaku dekan di fakultas pertanian Universitas Medan Area.
2. **Muhammad Fadly Abdina, SP, M.Si** selaku dosen pembimbing praktek kerja lapangan kami.
3. **Irvan Faisal SP** selaku manager kebun di PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV Unit kebun Sei Kopas.
4. **Mugiyanto, SP** selaku asistent kepala (ASTKA) di PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV Unit kebun Sei Kopas.
5. **Yudi Irfansyah, SP** selaku Asistent Afdeling VIII

Selama melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) kami banyak mendapatkan bimbingan dari asistent afdeling VIII di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV Unit Kebun Sei Kopas sesuai dengan silabus praktek umum dan penulisan laporan akhir yang selama ini lebih kurang dari 1 bulan yang telah sabar dalam membimbing kami dilapangan mengajari kami tentang perkebunan kelapa sawit. Semoga dengan ilmu yang kami peroleh dari bapak **Yudi Irfansyah SP**, dapat bermanfaat bagi kami sehingga kami dapat menghasilkan lulusan yang inovatif.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Akhir kata kami berharap agar Laporan praktek kerja lapangan (PKL) ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kami sendiri pada khususnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR KERJA PRAKTEK LAPANGAN	
KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang PKL	9
1.2 Ruang lingkup	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan.....	10
BAB II SEJARAH PERKEBUNAN	
2.1 Sejarah Perusahaan Perkebunan Di Indonesia	11
2.1.1 Awal Pertumbuhan Perkebunan (1600-1870)	11
2.1.2 Masa Pra-Kolonial: Sistem Kebun Pada Masa Tradisional .	12
2.1.3 Perkebunan Pada Masa VOC (1600-1800)	13
2.1.4 Perkebunan Masa Pemerintahan Konservatif (1800-1830) ..	13
2.1.5 Sistem Tanam Paksa (1830-1870)	14
2.1.6 Perkembangan Perkebunan	15
2.1.7 Perkembangan Perusahaan Perkebunan (1870-1914)	15
2.1.8 Perkembangan Perkebunan dari Perang Dunia I sampai Perang Dunia II (1914-1942)	16
2.1.9 Krisis Dunia sampai Perang Dunia II (1929-1942)	16
2.1.10 Masyarakat dan Kebudayaan perkebunan	17
2.1.11 Pendukung Jepang Revolusi dan Zaman Republik Indonesia Periode (1942-1955)	18
2.1.12 Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) dan Perusahaan	

Negara Perkebunan (PNP) (1956-1980)	19
2.2 Sejarah Singkat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV	20
2.3 Logo dan Makna Logo Perusahaan	24
2.4 Visi Misi, PT.Perkebunan IV	26
2.5 Profil PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sei Kopas	26
2.6 Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara IV kebun Sei Kopas	28
2.7 Struktur Organisasi Unit Kebun Sei Kopas	33

BAB III.METODOLOGI PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Rancangan dan Implementasi	34
3.2 Aspek Sosial Budaya	35
3.3 Konsep CSR (Corporate Social Responsibility)	36
3.4 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	36
3.4.1 Dasar Hukum CSR	36
3.4.2 CSR itu Kewajiban Perusahaan	37
3.4.3 Anggaran 2% dari Laba Perusahaan	37
3.5 Konsep-konsep yang berkaitan & Tanggung Jawab Social Perusahaan (CSR)	38
3.5.1 Konsep Pengembangan Masyarakat	38
3.5.2 Konsep Pemerdayaan Masyarakat	42
3.5.3 CSR dan BUMN	46

BAB IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	48
4.1.1 Kastrasi	49
4.1.2 Pemupukan TBM	51
4.2 Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)	54
4.2.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	54
4.2.2 Pengendalian Gulma	54
4.2.3 Penyemprotan dengan Herbisida	55
4.2.4 Penunasan	55
4.2.5 Pengendalian Hama Ulat Api	58

4.2.6 Global Telling	59
4.2.7 Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit	63
4.2.8 Pembersihan Piringan	65
4.2.9 Pemupukan pada Tanaman Menghasilkan (TM)	
4.3 Pemanenan Kelapa Sawit (Pasca Panen	67
4.3.1 Kriteria Matang Panen	67
4.3.2 Alat-alat Panen	67
4.3.3 Rotasi Panen	68
4.3.4 Hancak Panen	68
4.3.5 Persiapan Panen	69
4.3.6 Cara Panen	70
4.4 Administrasi Afdeling	72

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Struktur Organisasi Kebun	32
1.2 Pemupukan Tanaman Belum Menghasilkan	51
1.3 Tingkat Serangan Tikus.....	63
1.4 Peta Kavled Panen	69

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Logo dan Makna Perusahaan	24
1.2 Gambar Kastrasi	49
1.3 Gambar Pemupukan TBM	50
1.4 Gambar Penunasan	56
1.5 Gambar Global Telling	59
1.6 Gambar Pengendalian Hama dan Ulat Api	64
1.7 Gambar Pembersihan Piringan	65
1.8 Gambar Pengeboran / Pemoketan Pemupukan	67
1.9 Gambar Alat-Alat Panen	68
1.10 Gambar Hasil Panen di TPH	71
1.11 Gambar Pembelajaran Tentang Administrasi	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman kelapa sawit dalam bahasa latin dinamakan *Elaeis guineensis* Jacq. Kata *Elaeis* berasal dari kata *Elaion* dari bahasa Yunani yang berarti minyak dan kata *guineensis* berasal dari kata Guinea yaitu merupakan nama suatu daerah di Pantai Barat Afrika, sedangkan kata Jacq adalah singkatan dari Jacquin seorang botanis dari Amerika yang pertama membuat susunan taksonomi dari tanaman ini. Tanaman kelapa sawit di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan ditanam di Kebun Raya Bogor (Pahan, 2011).

Sektor perkebunan menjadi sumber devisa utama bagi Indonesia dengan kelapa sawit sebagai ujung tombaknya. Produksi *Crude Palm Oil* (CPO, minyak sawit mentah) Indonesia di tahun 2007 telah lebih unggul sekitar 1 juta ton dibanding Malaysia. Minat untuk terus membuka kebun sawit baru, pada tahun-tahun mendatang akan sangat besar karena tanaman kelapa sawit memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebab tanaman kelapa sawit memiliki banyak keunggulan dibanding dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya (Fauzi, 2012)

Pembangunan perkebunan kelapa sawit memerlukan tenaga-tenaga yang berpengalaman dalam budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit serta mengelola dan memberdayakan semua sumber daya produksi tanaman sehingga tercapai kinerja bidang produksi secara optimal hal ini disebabkan oleh harga CPO di pasar dunia yang terus naik, mengikuti kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional. Selain itu, minyak nabati terutama CPO akan terus dilirik sebagai bahan biodiesel, bahan dasar obat-obatan dan kosmetik (Purwantoro, 2008).

Praktek kerja lapangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengenyam pendidikan untuk mempraktekkan semua teori yang dipelajari di bangku pendidikan dengan cara terjun langsung kelapangan. PKL ini sangat diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, skill, pengalaman, mandiri, beretos kerja dan berdaya saing tinggi karena bangsa Indonesia dihadapkan pada

tantangan yang semakin berat yaitu kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi (Periandi, 2012).

Praktek kerja lapangan dilakukan agar mahasiswa pertanian mendapatkan pengalaman dan mengetahui kondisi pertanian yang sebenarnya, hasil serta sistem manajemen serta kemampuan berkomunikasi, keterampilan di lapangan, membentuk jiwa kepemimpinan, serta melatih untuk berjiwa wirausaha dan mempermudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan terutama dibidang pertanian (Andi, 2013). Pengetahuan budidaya tanaman kelapa sawit secara efektif akan diperoleh dengan cara melakukan PKL di perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit dan salah satu perusahaan tersebut adalah PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sei Kopas yang terletak di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, untuk meyempurnakan kegiatan praktek kerja lapangan ini kami akan menyusun laporan praktek kerja lapangan dengan judul “ Praktek Kerja Lapangan di PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sei Kopas”.

1.2 Ruang Lingkup

Praktek Kerja Lapangan dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sei Kopas memusatkan untuk mengetahui serangkaian proses budidaya tanaman kelapa sawit secara praktek langsung sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan, wawasan, pengalaman, dan keterampilan yang berguna untuk dijadikan modal dalam dunia kerja bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Kegiatan PKL di PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sei Kopas dilakukan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 22 July – 23 Agustus.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Tujuan dan manfaat kegiatan PKL ini adalah untuk memberikan informasi kepada mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area mengenai bagaimana serangkaian proses budidaya tanaman kelapa sawit secara keseluruhan penting untuk dilakukan untuk memperkaya pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan keterampilan yang berguna untuk dijadikan modal dalam dunia kerja sekaligus membangun hubungan kerja sama antara Fakultas Pertanian Universitas Medan Area dengan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sei Kopas.

BAB II

SEJARAH PERKEBUNAN

2.1 Sejarah Perusahaan Perkebunan Di Indonesia

Sejarah Perkebunan di Indonesia terdiri dari dua belas bagian yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terdiri lima bagian yang menjelaskan tentang perkebunan pada masa pra kolonial hingga berakhirnya tanam paksa di Hindia Belanda tahun 1600-1870. Bagian kedua terdiri dari 7 bagian yang menjelaskan mengenai perkembangan perkebunan periode liberal hingga periode 1980.

2.1.1 Awal Pertumbuhan Perkebunan (1600-1870)

Sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Sistem perkebunan hadir sebagai perpanjangan tangan dari perkembangan kapitalis Barat. Sebelum Barat memperkenalkan sistem perkebunan, masyarakat agraris Indonesia telah mengenal sistem kebun sebagai sistem perekonomian tradisional. Usaha kebun dijadikan usaha pelengkap atau sampingan dalam kegiatan pertanian pokok. Ciri umum pertanian masyarakat agraris pra kolonial atau pra industrial adalah subsisten.

Sistem perkebunan yang dibawa oleh Barat berbeda dengan sistem kebun pada pertanian tradisional dimana sistem perkebunan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan lahan yang luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang rapi, dan penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial untuk pasaran dunia.

Proses perubahan sistem usaha kebun ke sistem perkebunan di Indonesia tidak hanya membawa perubahan teknologis dan organisasi proses produksi pertanian tetapi juga berkaitan dengan perubahan kebijaksanaan politik dan sistem kapitalisme kolonial yang menguasai. Oleh karena itu, perkembangan sistem perkebunan sejajar dengan fase-fase perkembangan politik kolonial dan sistem kapitalisme kolonial yang melatarbelakanginya. eksploitasi produksi pertanian

diwujudkan dalam bentuk usaha perkebunan negara seperti Kulturstelsel. Proses agroindustrialisasi semakin meluas ketika pemerintah melaksanakan kebijakan konservatif pada tahun 1870. Kemudian pada awal abad ke-20, pemerintah melaksanakan politik etis sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

2.1.2 Masa Pra-Kolonial: Sistem Kebun Pada Masa Tradisional

Masyarakat dikepulauan Nusantara telah melakukan berbagai kegiatan pertanian, terdapat empat macam sistem pertanian yang telah lama dikenal, yaitu sistem perladangan, sistem persawahan, sistem kebun dan sistem tegalan. Namun, studi tentang agraria di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Eropa lebih memerlukan sistem pertanian perladangan dan tegalan sebagai sistem yang lebih menguntungkan yang menghasilkan tanaman yang laku dipasaran dunia.

Proses komersialisasi di daerah pantai pada abad ke-16 telah mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan Islam dan pertumbuhan kota-kota emporium di sepanjang pantai Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Kedudukan Jawa sebagai daerah persawahan ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan agraris seperti Mataram Lama, Jenggala, Kediri, Singasari, Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Di luar Jawa seperti Maluku lebih mengandalkan surplus tanaman kebun, yaitu rempah-rempah. Ada juga yang memiliki sumber pendapatan lain sebagai bandar emporiumnya seperti Makassar, Banjarmasin, Aceh, dan Palembang.

Kehadiran bangsa Eropa di Indonesia telah menyebabkan bertambahnya permintaan akan produksi Indonesia secara cepat, meningkatnya harga, memepertajam konflik politik dan ekonomi, meluasnya kapitalisme politik Eropa, dan timbulnya perimbangan-perimbangan baru dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis dan Belanda membawa dampak yang paling penting dalam kehidupan politik dan ekonomi perdagangan di Indonesia. Kehadiran VOC di Indonesia menyebabkan timbulnya pergeseran-pergeseran dalam sistem perdagangan dan eksploitasi bahan komoditi perdagangan.

2.1.3 Perkebunan pada Masa VOC (1600-1800)

Bangsa Eropa datang untuk mendapatkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Kedatangan Portugis pada abad ke-16 menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap komoditi rempah-rempah. Disusul dengan kedatangan bangsa Belanda, mengakibatkan semakin kerasnya persaingan dan meningkatnya harga rempah-rempah. Belanda menggunakan VOC untuk menguasai perdagangan di Nusantara.

VOC didirikan oleh negara-negara kota, yaitu negara federasi yang ada di Belanda. VOC berusaha menguasai daerah penghasil komoditi dagang seperti Jawa penghasil beras, Sumatera penghasil lada dan Maluku penghasil rempah-rempah. Dengan itu, VOC berusaha menggunakan cara-cara yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat lokal.

VOC melakukan tiga cara dalam menguasai perdagangan di Nusantara. Pertama, melalui peperangan atau kekerasan seperti di Pulau Banda, Batavia, Makassar, dan Banten. Kedua, mengadakan kontak dagang dengan saudagar-saudagar setempat seperti di Ternate, Cirebon, dan Mataram. Ketiga, mengikuti perdagangan bebas yang berlaku di daerah lokal seperti di Aceh.

Kegiatan perdagangan VOC selalu berorientasi pada pasaran dunia sehingga kebijakan yang diambil di Nusantara sering berubah sesuai dengan kondisi pasar. Oleh karena itu, VOC melakukan eksploitasi agraria dengan memperkenalkan sistem penyerahan wajib dan kontingensi. Selain itu, VOC berusaha melakukan pengembangan komoditi perdagangan baru seperti tebu, kopi, dan indigo.

Perluasan daerah dan peningkatan kekuasaan politik yang cepat abad ke-18 menyebabkan VOC berubah karakter dari perusahaan dagang menjadi penguasa teritorial. VOC mengeluarkan kebijakan yang pragmatis yaitu perluasan dari sistem penyerahan wajib ke sistem penanaman wajib tanaman perdagangan.

2.1.4 Perkebunan Masa Pemerintahan Konservatif (1800-1830)

Pergantian politik pemerintahan ke pemerintahan Hindia Belanda pada peralihan abad ke-18 sampai abad ke-19 memberikan latar perkembangan sistem perkebunan di Indonesia pada abad ke-19 yang ditandai dengan kebangkrutan VOC. Pada masa yang sama, di Eropa terjadi perluasan paham dan cita-cita liberal, sebagai akibat dari revolusi Perancis. Kelahiran kaum Liberal di Belanda yang dipelopori oleh Dirk van Hogendorp menghendaki dijalankannya politik liberal dan sistem pajak dengan landasan humanisme. Namun, pemerintah kolonial lebih cenderung menerima gagasan konservatif yang lebih cocok dengan kondisi negara jajahan.

Sistem sewa tanah diterapkan, membawa dampak yang perubahan yang mendasar yang semula dijalankan oleh pemerintahan tradisional berubah menjadi ke sistem kontrak dan perdagangan bebas. Dalam pelaksanaannya, sistem sewa tanah tidak dapat dilaksanakan diseluruh Jawa seperti di *Ommelanden* dan Priangan. Sistem sewa tanah ini merupakan kebijakan Inggris yang diterapkan di India, dimana India memiliki perbedaan struktural dan kultural dengan Indonesia.

2.1.5 Sistem Tanam Paksa (1830-1870)

Kegagalan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan sebelumnya, menyebabkan van den Bosch pada tahun 1830 diangkat menjadi gubernur Jendral di Hindia Belanda dengan gagasannya mengenai *Cultuur Stelsel*. Sistem tanam paksa merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dengan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah juga menghendaki adanya penyatuan kembali antara pemerintah dan kehidupan perusahaan dalam menangani produksi tanaman ekspor. Pelaksanaan sistem tanam paksa sebagian besar dilaksanakan di Jawa. Jenis tanaman wajib yang diperintahkan untuk ditanami rakyat yaitu kopi, tebu, dan indigo, selain itu ada lada, tembakau, teh, dan kayu manis.

Pelaksanaan sistem tanam paksa menyebabkan tenaga kerja rakyat pedesaan menjadi semakin terserap baik ikatan tradisional maupun ikatan kerja bebas dan komersial. Sistem tanam paksa juga telah membawa dampak diperkenalkannya sistem ekonomi uang pada penduduk desa. Selain itu, akibat

dari peningkatan produksi tanaman perdagangan banyak dilakukan perbaikan atau pembuatan irigasi, jalan, dan jembatan.

2.1.6 Perkembangan Perkebunan (1870-1942)

Pada akhir abad ke-19, pertumbuhan ekonomi Belanda menginjak proses industrialisasi. Hal ini melatar belakangi munculnya liberalisme sebagai ideologi yang dominan di negeri Belanda. Sehingga berdampak pada penetapan kebijakan di negaeri jajahan. Sehubungan dengan itu, tahun 1870 merupakan tonggak baru sejarah yang menandai permulaan zaman baru bercorak ekonomi liberal.

Undang-undang agraria tahun 1870 menetapkan:

1. Tanah milik rakyat tidak dapat diperjual belikan dengan non-pribumi.
2. Disamping itu, tanah domain pemerintah sampai seluas 10 bau dapat dibeli oleh non pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan.
3. Untuk tanah domain lebih luas ada kesempatan bagi non-pribumi memiliki hak guna, ialah:
 - a. Sebagai tanah dan hak membangun (RVO).
 - b. Tanah sebagai *erfpacht* (hak sewa serta hak mewariskan) untuk jangka waktu 75 tahun.

Industrialisasi pertanian menuntut pembangunan infrastruktur yang lebih memadai, antara lain jalan raya, kereta api, irigasi, pelabuhan, telekomunikasi, dsb.

2.1.7 Perkembangan Perusahaan Perkebunan (1870-1914)

Prinsip ekonomi liberal secara formal meberikan kebebasan kepada petani untuk menyewakan tanahnya dan dilain pihak menyediakan tenaganya bagi penyelenggaraan perusahaan perkebunan. Pada masa ini, insentif yang diterima oleh petani jauh lebih besar ketimbang pada saat tanam paksa.

Pada masa transisi terlihat jelas proses pergeseran dari usaha pemerintah ke swasta dengan penyusutan perkebunan milik pemerintah dan meluasnya perkebunan swasta. Komoditi yang memegang peranan penting adalah kopi, gula, teh, tembakau, teh, dan indigo. Hal ini dikarenakan banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Hindia Belanda.

Politik etis yang terkenal dengan triadenya, emigrasi, edukasi, dan irigasi, mulai dijalankan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1901 sebagai politik kehormatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Perkembangan perkebunan pada masa ini memperlihatkan peningkatan terus, yang paling menonjol adalah peningkatan dari tahun 1905 hingga 1909.

2.1.8 Perkembangan Perkebunan dari Perang Dunia I sampai Perang Dunia II (1914-1942)

Dekade terakhir menjelang pecahnya perang dunia I ditandai oleh kemajuan pesat berbagai perusahaan perkebunan. Laju perekonomian menunjukkan konjungtur yang membumbung, maka pecahnya perang Dunia I mengganggu kecenderungan itu. Permintaan akan komoditi di pasaran dunia mengalami perubahan karena disesuaikan dengan keperluan perang. Situasi perang sangat mengurangi transportasi dan produksi barang impor. Nilai pendapatan tidak berubah bahkan menurun hingga tahun 1921.

Sejak akhir abad ke-19, Belanda sengaja melaksanakan politik “pintu terbuka” sebagai akibat dari internasionalisasi perdagangan seperti Amerika dan Jepang yang mulai meningkatkan perdagangannya dengan Indonesia.

Pada akhir abad ke-19, perkebunan pribumi hanya 10% dari seluruh ekspor, namun meningkat menjadi 37% pada tahun 1939. Hal ini seiring dengan penetrasi ekonomi kapitalisme di Indonesia.

Menjelang krisis dunia pada tahun 1929, menunjukkan angka peningkatan produksi perkebunan yang sangat meningkat. Di masa itu, secara tidak langsung merangsang kebutuhan masyarakat ke arah kehidupan mewah, sehingga konsumsi masyarakat meningkat. Hal ini diikuti oleh bertambahnya pendapatan pemerintah. Masa-masa sebelum krisis dianggap sebagai masa kejayaan perusahaan perkebunan.

2.1.9 Krisis Dunia sampai Perang Dunia II (1929-1942)

Krisis *malaise* yang terjadi pada tahun 1930-an menyebabkan harga-harga komoditi turun, sedangkan biaya produksi termasuk upah turunnya sangat lambat. Dalam menghadapi krisis itu, pemerintah Belanda menjalankan politik moneter yang berbeda, yaitu: 1. Menurunkan gaji dan upah, 2. Mengadakan pajak-pajak baru, 3. Menurunkan berbagai tarif.

Kesulitan yang dihadapi Hindia Belanda dalam melakukan ekspor dan impor, antara lain adalah sukarnya mencari daerah ekspor, bahkan muncul produsen baru untuk komoditi yang tadinya dikuasai oleh Indonesia.

Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 1930 menunjukkan semuanya menurun, jumlah pabrik, areal kebun tebu, volume produksi, dan nilai penghasilannya. Dalam hal ini, rakyat ikut menderita kerugian akibat berkurangnya sewa tanah, upah buruh dan pembayaran berbagai pelayaran.

Kedudukan Hindia Belanda sangat dipengaruhi oleh proses industrialisasi yang semakin meningkat di dunia barat, sehingga ada perubahan permintaan kebutuhan akan bahan dasar dan tidak lagi pada barang-barang mewah seperti rempah-rempah. Pihak Indonesia berusaha mencari outlet baru karena pasaran dalam negeri belum mampu menyerap berbagai produksi perkebunan.

Kedudukan komoditi lama masih di atas seperti kopi, gula, teh, karet, tembakau, dan kina. Sedang komoditi baru mulia memonopoli seperti kopra. Selama periode ini banyak pembatasan dan pengawasan yang dilakukan bagi perkebunan eropa sedang hal itu sulit diterapkan terhadap perkebunan rakyat.

2.1.10 Masyarakat dan Kebudayaan Perkebunan

Kebanyakan perkebunan terletak di didaerah-daerah pegunungan dan terpencil. Masyarakatnya adalah multirasial yang terdiri dari atas bangsa Eropa, Cina dan Jawa. Golongan-golongan dalam komunitas baru belum terikat oleh ikatan solidaritas baru.

Pada umumnya, masa periode awal perusahaan perkebunan, lingkungan masyarakat yang terbatas masih dikuasai oleh hubungan patrimonial sehingga masih ada suasana kekraban dan kekeluargaan. Dalam perkembangannya,

muncullah kebutuhan akan manajemen yang rasional dan efisien sesuai dengan tujuan peningkatan produktivitas setinggi-tingginya.

Pengaruh pemerintah kolonial tidak banyak menyentuh masyarakat perkebunan, ada keseganan dan sikap kurang mempedulikan. Posisi kaum pemerintah kurang berwibawa terhadap kaum perkebunan, sehingga banyak keadaan yang kurang beres di perkebunan dibiarkan dan tidak ada usaha menegakkan kekuasaan pemerintah.

Dalam mencari hiburan, kaum Eropa berkumpul di *scieteit* untuk minum-minum, dansa-dansi, main kartu, bilyar, dsb. Kaum Eropa mereka memandang rendah golongan pribumi dan kontak terbatas pada hubungan kerja. Perbedaan yang sangat mencolok dengan kaum pekerja menyebabkan dualisme ekonomi. Dalam kondisi yang serba berat, secara fisik pekerja dieksploitasi secara maksimal menyebabkan mereka menghibur diri dengan berjudi, menghisap candu, melacur yang menjerumuskan mereka kedalam ikatan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

2.1.11 Pendudukan Jepang, revolusi dan zaman republik Indonesia Periode 1942-1955

Periode ini mencakup zaman pendudukan Jepang, zaman revolusi dan zaman republik Indonesia. Selama pendudukan Jepang segala lapangan kegiatan ditujukan untuk menopang usaha perang. Untuk memenuhi kebutuhan bahan panganan terutama beras, diadakan wajib setor. Namun, hal ini banyak sekali hambatannya, sehingga perkebunan banyak yang terlantar. Adapula yang dihentikan usahanya.

Dalam periode 1949-1950, di daerah RI hanya tinggal beberapa pabrik gula yang masih beroperasi. Sedangkan tembakau dan lainnya hanya melayani konsumsi dalam negeri. Disamping itu banyak gangguan keamanan oleh gerombolan liar. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa penanam modal tidak tertarik menanamkan modalnya secara besar-besaran di Indonesia.

Sejak berdirinya, RI menghadapi keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan antara lain mewarisi keuangan federal dan RI Yogyakarta dengan defisit besar, inflasi kuat, ketidakseimbangan antara ekspor dan impor. Indonesia telah kehilangan sebagian besar pasarannya sebelum perang ditambah dengan

pemulihan perkebunan yang lambat menyebabkan perkebunan sangat jauh tertinggal.

Beberapa gejala yang menggembirakan ialah munculnya gerakan koperasi, pembangunan pedesaan, kelompok wiraswastawan dan badan usaha pribumi, antara lain Yayasan Kopra dan TNV. Komoditi perkebunan yang paling dapat bertahan adalah karet. Sebagai dampak dari Perang Dunia II, perkebunan pada umumnya mengalami kerusakan berat, maka diperlukan usaha pemugaran secara besar-besaran. Berdasarkan Ketentuan Perundiangan Meja Bundar akhir 1949, perkebunan milik pemerintah kolonial diambil alih oleh pemerintah RI.

2.1.12 Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) dan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) (1956-1980)

Periode ini mencakup perkembangan perkebunan di bawah penanganan Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) dan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Perkembangan perkebunan pada periode ini tidak terlepas dari pengaruh perubahan dan perkembangan kehidupan politik dan sistem perekonomian yang berlaku selama itu di Indonesia.

Pada tahun 1957-1960, kebijaksanaan Ekonomi Terpimpin besar pengaruhnya terhadap perubahan kebijaksanaan di sektor perekonomian. Antara lain Deklarasi Ekonomi memberikan pengaruh penting terhadap langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dalam sektor perekonomian. Pengambilalihan perusahaan milik Belanda oleh pemerintah seperti perusahaan swasta perkebunan milik Belanda diambil alih oleh pemerintah pada 10 Desember 1957. Perusahaan ini tidak digabungkan dalam PPN yang sebelumnya ada melainkan digabungkan dalam PPN Baru.

Pada tahun 1968 terjadi pengurangan jumlah PPN dari 88 menjadi 28 buah, penghapusan BPU (PP. No.13, tanggal 27 Maret 1968), pembentukan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), selanjutnya diikuti dengan penetapan pembentukan Badan Khusus Urusan Perusahaan Negara (BKU-PN) pada tahun 1969 yang menetapkan pemisahan antara Ditjen Perkebunan dengan BKU-PNP.

Perkembangan sesudah tahun 1980-an menunjukkan bahwa sektor perkebunan masih tetap merupakan salah satu sumber perekonomian negara.

Kebijaksanaan pemerintah untuk mengalihkan produksi ekspor migas ke non migas telah mengokohkan kembali keberadaan perkebunan di Indonesia. Upaya pembinaan dan pelestarian melalui berbagai model dan pendekatan seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dilaksanakan.

2.2 Sejarah Singkat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV

PT Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan Badan Usaha Milik Negara bidang perkebunan yang berkedudukan di Medan, Provinsi Sumatera Utara. PT. Perkebunan Nusantara IV Medan memproduksi tanaman kelapa sawit dan teh. Pada umumnya perusahaan-perusahaan perkebunan di Sumatera Utara memiliki sejarah panjang sejak zaman Belanda. Pada awalnya keberadaan perkebunan ini merupakan milik Maskapai Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1959, dan selanjutnya berdasarkan kebijakan pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan organisasi sebelum menjadi PT Perkebunan Nusantara IV Medan.

Secara kronologis riwayat PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, dapat disajikan sebagai berikut:

- Tahun 1959, Tahap Nasionalisasi.

Perusahaan-perusahaan swasta asing (Belanda) seperti NV HVA (*Namblodse Venotschaaf Handels Vereeniging Amsterdam*) dan NV RCMA (*Namblodse Venotshaaf Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam*) pada tahun 1959 dinasionalisasi oleh Pemerintah RI dan kemudian dilebur menjadi Perusahaan Milik Pemerintah atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 19.

- Tahun 1967, Tahap Regrouping.

Pada tahun 1967 – 1968 selanjutnya Pemerintah melakukan *regrouping* menjadi perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Aneka Tanaman, PPN Karet dan PPN Serat.

- Tahun 1968, Tahap Perubahan.

Menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) dengan Kepres NO. 144 tahun 1968, Perusahaab Perkebunan Negara (PPN) yang ada di Sumatera Utara dan Aceh di *regrouping* ulang menjadi PNP I s.d. IX.

- Tahun 1971, Tahap Perubahan menjadi Perusahaan Perseroan.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah Tahun 1971 dan tahun 1972, Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) dialihkan menjadi Perusahaan Terbatas Persero dengan nama resmi PT Perkebunan I s.d. IX (Persero). Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1971, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1971 dan Perusahaan Perseroan (Persero) dan PT Perkebunan VIII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1972.

- Tahun 1996, Tahap Peleburan menjadi PTPN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pada tahun 1996, semua PTP yang ada di Indonesia di-*regrouping* kembali dan dilebur menjadi PTPN I s.d. XIV dan PT Perkebunan Nusantara IV dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV.

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) merupakan hasil peleburan dari tiga Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII yang berada di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan Proyek Pengembangan PTP VI, PTP VII, dan PTP VIII yang ada diluar Sumatera Utara diserahkan kepada PTPN yang dibentukn masing-masing Provinsi.

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) didirikan di Bah Jambi Simalungun, Sumatera Utara berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 11 Maret 1996 dari Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8332.HT.01.01. Tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, Tambahan No. 8675/1996, serta telah didaftarkan pada Kantor

Pendaftaran Perusahaan Tingkat I Sumatera Utara c.q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun No. 001/BH.2.15/ IX/ 1996 tanggal 16 September 1996 dan telah diperbaharui dengan Nomor 07/BH/0215/VIII/01 tanggal 23 Agustus 2001.

Pada tanggal 2008 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta No. 11 dari Notaris Sri Ismiyati, SH tanggal 4 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-60615.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perusahaan Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan dari Persero menjadi Anak Perusahaan BUMN Perkebunan. Pada tahun 2014 sesuai Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan, berdasarkan akta No. 25 tanggal 23 Oktober 2014 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, mengenai perubahan struktur pemegangan saham dan nama Perusahaan dari Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV menjadi PT Perkebunan Nusantara IV. Perubahan anggaran dasar ini telah dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan No.AHU-08636.40.21.14, tanggal 19 N0vember 2014.

2.2.1 Maksud Dan Tujuan Perusahaan

Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang Agro Industri serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

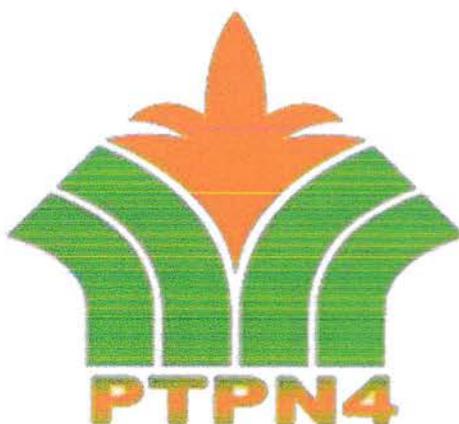
Maksud dan Tujuan Perusahaan menurut Akta Pendirian, antara lain :

- Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di sub sektor pertanian dalam arti seluas-luasnya dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat.

Tujuan melaksanakan kegiatan usaha, antara lain :

- Mengusahakan budidaya tanaman meliputi pembukuan dan pengolahan lahan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan dengan budidaya tanaman tersebut.
- Produksi meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barangsetengah jadi atau barang jadi.
- Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan barang lainnya yang sehubungan dengan kegiatan perusahaan.
- Pengembangan usaha di bidang perkebunan, agro usaha dan agro bisnis.
- Mendirikan / menjalankan perusahaan dan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha bidang pertanian baik secara sendiri-sendiri maupunbersama-sama dengan badan-badan lainnya sepanjang hal itu tidak bertentangan denagn peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Logo dan Makna Logo Perusahaan



Gambar 1. Logo PT. Perkebunan Nusantara IV

Makna dari logo PT Perkebunan Nusantara IV Medan, yaitu bentuk pohon sebagai gambaran dari pohon/buah yang mendekati bentuk tumbuhan dan digambarkan dengan tiga pelepah diatas serta dua pelepah di bawah. Tiga pelepah

di atas mempunyai arti dua unit perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit dan perkebunan teh yang menjadi satu. Kemudian dua pelepah di bawah selanjutnya memiliki arti sebuah “wadah”, maksudnya wadah tersebut merupakan tempat mengolah dua unit perkebunan di atasnya. Sedangkan untuk empat bidang lengkungan yang terletak paling bawah mempunyai arti suatu landasan yang menunjang kedua unit di atasnya. Lengkungan mengarah ke kanan dan ke kiri yang berarti PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) merupakan industri hulu dan industri hilir dan juga arah pengembangan/ pemasaran empat bidang ini di analogikan sebagai angka empat dari PT.Perkebunan Nusantara IV maka disebut PT Perkebunan Nusantara IV Medan.

Secara keseluruhan, bentuk logo ini mengarah ke atas kalau diambil garis lurus menuju /memusat ke satu titik, yang berarti ketajaman fokus usaha dalam mencapai tujuan demi kesejahteraan bersama yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai warna yang ada pada logo, menggambarkan lambang dan unsur etis yaitu warna hijau bersifat sejuk, dingin dan keyakinan. Sedangkan warna jingga bersifat panas, semangat dan berani.

Hijau pada empat bidang lengkung mengacu pada sifat sejuk dalam kerukunan kerja antar sesama karyawan dan atasan sehingga timbul keakraban timbal balik, tangan dingin serta keyakinan dalam mengelola pekerjaan yang membawa angin segar bagi keuntungan perusahaan dan kesejahteraan karyawan, jernih dalam pola pikir dan keyakinan dalam hasil kerja. Jingga pada wadah dan bentuk tiga pelepah adalah semangat membara untuk mempertahankan serta meningkatkan mutu produksi dalam merebut pasar dari para pesaing produk perusahaan yang ada di pasaran. Dengan tangan dingin serta keyakinan dan semangat kerja sama maka keberhasilan akan tercapai karena Karunia dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua berasal dari satu titik, yaitu Sang Maha Pencipta maka kita patut untuk mensyukurinya.

2.4 Visi Misi, PT.Perkebunan Nusantara IV

1. Visi Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara IV menjadi perusahaan unggul dalam usaha agroindustri yang terintegrasi.

2. Misi Perusahaan

1. Menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip usaha terbaik, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan usaha agroindustri berbasis kelapa sawit, teh, dan karet.
3. Mengintegrasikan usaha agroindustri hulu, hilir dan produk baru, pendukung agroindustri dan pendayagunaan aset dengan preferensi pada teknologi terkini yang teruji (proven) dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai visi misi tersebut, diperlukan suatu perencanaan jangka panjang (*corporate plan*) yang akan menjadi pedoman manajemen dalam menjalankan keputusan jangka panjang yang berkelanjutan dengan memperhatikan potensi kompetensi inti yang dimiliki PTPN IV yaitu sebagai produsen energi baru berbahan baku mikrohidro dan biomassa/biogas. Penyusunan rencana jangka panjang adalah bagian dari upaya yang konsisten dalam pelaksanaan dan pencapaian tata kelola perusahaan (*good corporate governance/GCG*). Visi dan Misi tersebut telah mendapat persetujuan dari Direksi.

2.5 Profil PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sei Kopas

a. Sejarah Umum PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sei Kopas

Unit Usaha Sei Kopas merupakan salah satu Unit Usaha PTPN-IV di bawah naungan Gu-I, yang berada di kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Jarak unit Sei Kopas dengan kantor pusat di Medan \pm 210 km, sedangkan jarak dengan Kantor Group Umit Usaha I- Bah Jambi \pm 81 km.

Unit Usaha Sei Kopas berdiri sejak 01 Januari 1981, berdasarkan HGU yang di terbitkan oleh Departemen Dalam Negeri yang tertuang dalam Surat

No.SK/52/HGU/DA/75 Tanggal 27 November 1975 seluas 1975 seluas 6.614.72 Ha. Kemudian tanggal 16 Juli 1982, PT. PERKEBUNAN VII membeli Kebun Kelapa Sawit PT.Lamhotma seluas 365 Ha, Sehingga luas HGU unit usaha Sei Kopas menjadi 6,979.72 Ha. HGU telah habis masa berlakunya tahun 2010 dan perpanjangannya masih dalam proses di BPN.

Sejak bulan maret 1996 sesuai peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1996, terjadi konsolidasi yang menjadikan PT.PERKEBUNAN VI,VII dan VIII digabung dengan sebutan PT.PERKEBUNAN IV (Persero) yang berkantor pusat di Medan.

Luas Tanaman Muda (umur 4 sampai dengan 8 tahun) terdiri dari tahun tanam 2006,2007,2008,2009, dan 2010 seluas 2835 ha. Untuk luas Tanaman Remaja (umur 9 sampai dengan 13 tahun) terdiri dari tahun tanam 2004 dan 2005 seluas 774 ha. Luas Tanaman Dewasa (umur 14 sampai dengan 20 tahun). Terdiri dari tahun tanam 1998 dan 1999 seluas 349 ha.

Untuk Tanaman Tua (umur 21 sampai dengan 24 tahun) dengan tahun tanam 1991 seluas 246 ha dan untuk tanaman diatas 24 tahun dengan tahun tanam 1987 sampai 1998 seluas 99 ha. Luas TBM III reabilitas tahun tanam 2010 seluas 130 ha. Sehingga keseluruhan luas tanaman baru yaitu 732 ha.

b. Topografi

- Luas Areal di kelola (TM + TBM)	: 5.002.00 Ha
- Emplasmen, Pondok dan Tanah Lapang	: 74.50 Ha
- Areal Konservasi	: 1.107.13 Ha
- Fasilitas Umum	: 148.69 Ha
- Tanah Garapan	: 333.40 Ha
- TM Diperbaiki (Heaten)	: 199.00 Ha
J u m l a h	: 6. 979.72 Ha
- Kelas Lahan (Type)	: C
- Areal Rata	: 1.847 Ha
- Areal Jurangan	: 3.288 Ha
- Letak Tinggi Dari Permukaan Air Laut	: 150 – 200 Mdpl
- Type Iklim/Curah Hujan	: A

2.6 Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sei Kopas

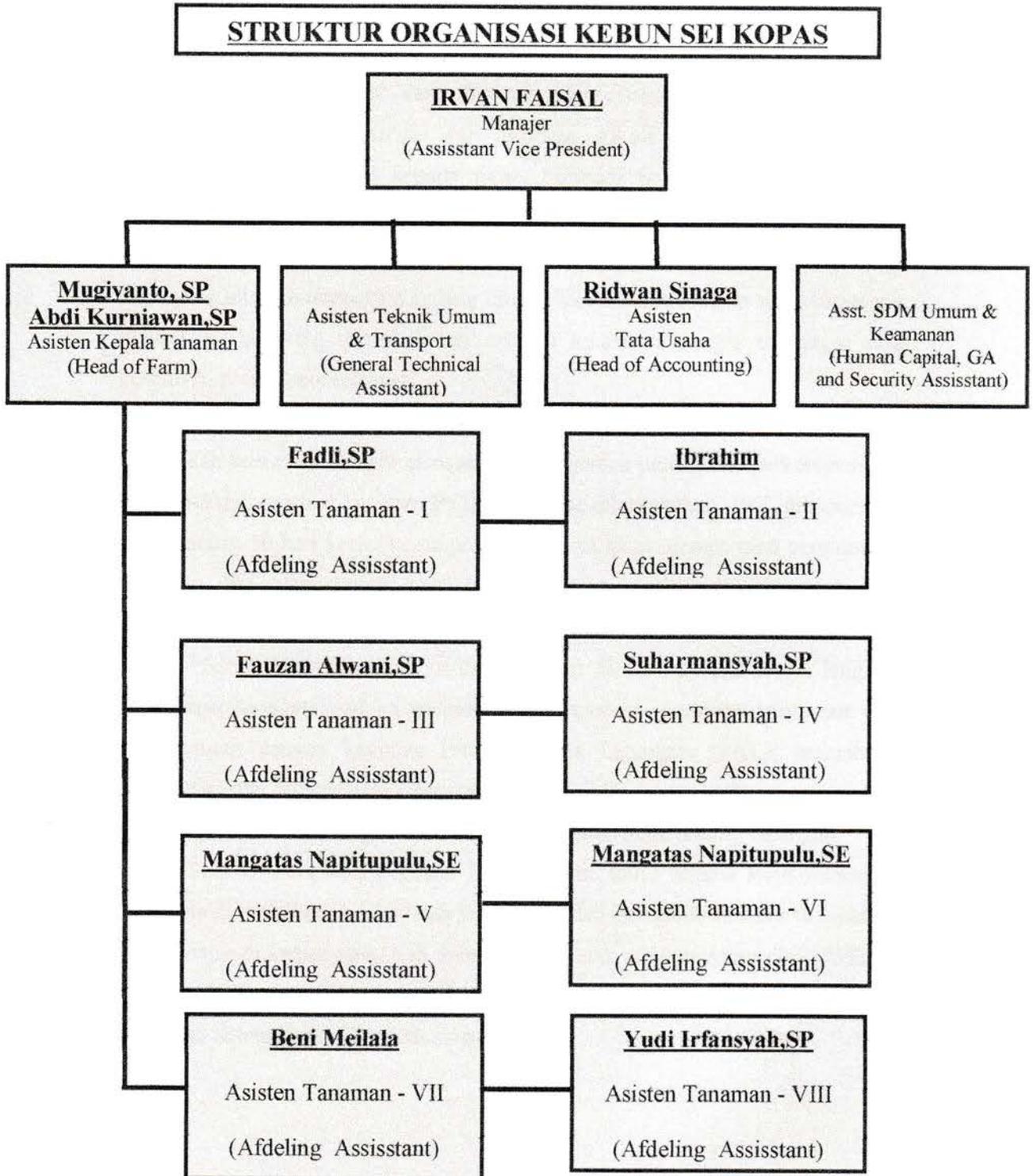
a. Visi

Menjadi pusat keunggulan pengolahan perusahaan Agroindustri Kelapa Sawit tata kelola perusahaan yang baik serta berwawasan lingkungan.

b. Misi

1. Menjadi keberlanjutan usaha yang kompetitif.
2. Meningkatkan daya saing produk secara berkeselimbangan dengan sistem, cara, dan lingkungan kerja yang mendorong munculnya kreatifitas dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
3. Meningkatkan laba secara berkesinambungan
4. Mengelola usaha secara professional untuk meningkatkan nilai perusahaan yang mempedomani etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
5. Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah pusat/daerah.

2.7 Struktur Organisasi Unit Kebun Sei Kopas



BAB III.

METODOLOGI PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Rancangan dan Implementasi

Rancangan praktek kerja lapangan ini dilakukan dengan membentuk kelompok sendiri yang terdiri dari 3 orang, lokasi tempat PKL mahasiswa diajukan oleh mahasiswa kepada pihak Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Are dengan pemberian surat pengajuan permohonan Praktik Kerja Lapangan melalui online. Lalu pihak program studi mengeluarkan surat pengantar ke tempat PKL yang dituju. Jika telah mendapat surat pengantar, mahasiswa langsung menghubungi instansi lokasi PKL agar mendapat surat kesediaan perusahaan tersebut.

Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kuliah pembekalan, lalu melakukan konsultasi dengan perwakilan/manajemen perusahaan perkebunanyang ada di Medan perihal kegiatan PKL yang akan dilaksanakan. PKL dilaksanakan lebih kurang 30 hari kerja, kelompok mahasiswa akan memperoleh pembimbing lapangan dari instansi/perusahaan perkebunan yang dituju dan mengisi jurnal harian yang merupakan bukti absensi di perkebunan.

Praktek kerja lapangan ini dilaksanakan dengan melihat secara langsung garis besar tentang keadaan perusahaan, mengenal pimpinan karyawan yang berhubungan dengan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL); memahami, mengamati dan mengevaluasi secara langsung di lapangan; serta mengumpulkan dan menganalisa data yang kemudian dikoreksi oleh pembimbing lapangan.

Selama mengikuti kegiatan PKL, program kerja selama lebih kurang 30 hari kerja di perkebunan ini adalah mengamati dan mengikuti mandor di lapangan serta belajar di kantor yang tiap minggunya pindah afdeling yaitu dari afdeling I hingga afdeling VIII dimana pada kegiatan di kantor ini kami semua belajar mengenai administrasi di perkebunan.

3.2 Aspek Sosial Budaya

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV Unit Kebun Sei Kopas memiliki berbagai kegiatan sosial dengan masyarakat dengan cara memberikan berbagai kebutuhan secara langsung kepada masyarakat dengan bantuan kepala desa setempat ataupun membantu masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan di masyarakat baik berupa uang tunai maupun sarana untuk mendukung kegiatan masyarakat adapun kegiatan sosial Kebun Batang Serangan yaitu berupa pemberian sembako kepada masyarakat kurang mampu, membagikan sembako berupa gula kepada pihak masjid di masyarakat pada Bulan Ramadhan dan juga memberikan santunan kepada anak yatim menjelang Hari Raya Idul Fitri, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu disekitar Kebun Batang Serangan selain itu Kebun Batang Serangan juga berperan dalam mendukung kegiatan masyarakat seperti peringatan hari raya islam, kegiatan hari besar dan kegiatan yang bersifat sosial bagi masyarakat dengan cara memberikan bantuan berupa uang tunai, lahan ataupun sarana/prasarana untuk kegiatan masyarakat tersebut.

3.3 Konsep CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007. Melalui undangundang ini, industri atau korporasi wajib untuk melaksanakannya, Pola community development merupakan bentuk CSR yang saat ini banyak dipraktikkan oleh perusahaan besar. Implementasi community development merupakan modal sosial (social capital) dapat dimanfaatkan dan didayagunakan. Suharto (2005:2) menjelaskan bahwa modal “sosial adalah sumber (resource) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas, sehingga timbul kepercayaan, serta saling pengertian”. Pola hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama atau kegiatan kolektif antar warga masyarakat.

Kegiatan bersama antar warga masyarakat dapat terbangun bila terpenuhi ketersediaan elemen-elemen modal sosial. Elemen-elemen modal sosial tersebut adalah kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong-royong, jaringan, dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan serta kejahatan (Suharto,2005:2). Ketika CSR diimplementasikan melalui model alternatif implementasi CSR yang berbasis pemanfaatan modal sosial, maka akan lebih bermakna bagi pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, maupun budaya secara berkelanjutan. Mengingat CSR bersifat intangible (kasat mata), maka sulit Universitas Sumatera Utara 8 dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Oleh karena itu, diperlukan berbagai pendekatan kuantitatif dengan menggunakan PROPER. PROPER atau Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan hidup adalah salah satu instrumen kebijakan untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3.4 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

3.4.1 Dasar Hukum CSR

CSR dikenal juga dengan sebutan TJSL (Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan) itu sudah diatur sedemikian rupa dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), UU No. 25 Th 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.22 Th 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PP 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan terbatas dan Permeneg BUMN No.PER-05/MBU/2007 tentang Program kemitraan BUMN dan usaha kecil dan bina lingkungan.

3.4.2 CSR itu kewajiban perusahaan

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa Tanggungjawab sosial adalah komitmen perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Ketentuan pokoknya menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam, tanggung jawab sosial ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam operasionalnya, tanggung jawab sosial dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai AD perseroan. rencana kerja tahunan Perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial, pelaksanaan program tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada.

3.4.3 Anggaran 2% dari Laba perusahaan

Aturan mengenai jumlah anggaran CSR ada di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007, yakni 2% laba perusahaan harus disisihkan untuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Tampaknya, ketentuan 2% laba ini juga menjadi batasan umum di tataran praktis bagi perusahaan yang mengimplementasikan program CSR, walaupun diperbolehkan juga perusahaan menganggarkan lebih banyak lagi. Inilah yang menyebabkan beragamnya jumlah anggaran CSR masing-masing perusahaan. Perusahaan besar dengan laba besar, tentu memiliki porsi dana CSR yang lebih besar pula. walau demikian, tidak berarti perusahaan kecil maupun menengah akan kehilangan peluang, peran ataupun kreativitasnya dalam mengemas program CSR. karena di atas segalanya, perusahaan perlu CSR sebagai investasi jangka panjang mengenai

reputasi/citra/image. Dari berbagai sumber diketahui bahwa program-program CSR yang dilakukan perusahaan itu beragam, ada yang mengembangkannya di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya dengan anggaran yang berbeda-beda. Pembangunan fisik infrastruktur mestinya tidak dilakukan oleh perusahaan, mengingat jumlah anggaran yang dibutuhkan biasanya sangat besar, terlebih cakupannya sangat luas. porsi terbesar sebaiknya diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat utamanya ketrampilan agar mudah mendapatkan akses pekerjaan maupun peluang usaha. untuk ikut mengurangi kemiskinan maupun pengangguran dapat menggandeng BLKI-BLKI di kota/kabupaten setempat sebagai mitra pelaksana program CSR. programnya dapat berupa BLK Masuk Desa, BLK Keliling, dll. Mengingat pentingnya SDM sebagai subyek pembangunan maka program CSR bidang ini perlu diperkuat untuk dijadikan investasi strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaannya pun harus terbuka, dan melibatkan elemen-elemen masyarakat yang memiliki kemampuan dan profesional bukan mengandalkan koneksi pribadi dan kolusi. Tender terbuka perlu dibudayakan dibarengi komitmen kuat pelaksana dari perusahaan.

3.5 Konsep-konsep yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Persahaan (CSR) .

3.5.1 Konsep Pengembangan masyarakat (Community Development)

Pengembangan masyarakat yang juga dikenal dengan pembangunan masyarakat, menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat desa sebagai penanggung eksekusi dari pembangunan regional atau nasional. Pengertian tersebut mengandung makna, betapa pentingnya inisiatif local, partisipasi masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat desa (Soelaiman, 1998:132). Program pembangunan masyarakat ini tidak berpusata pada birokrasi melainkan berpusat pada masyarakat atau komunitasnya sendiri. pemberian kekuasaan pada inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pembangunan

masyarakat. Berkaitan dengan batasan pengertian di atas ada beberapa unsur dalam pengertian pembangunan masyarakat, yaitu menitikberatkan pada komunitas sebagai suatu kesatuan, mengutamakan prakarsa dan sumber daya setempat, sinergi antara sumber daya internal dan eksternal serta terintegrasinya masyarakat local dan nasional. pada arah tersebut, pengembangan komunitas diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam identifikasi kebutuhan mereka, kapasitas mengidentifikasi sumber daya, peluang dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pembangunan. Peningkatan masyarakat diarahkan pada kemampuan individu untuk memproses keseluruhan pengalaman sosialnya, termasuk pemahamannya terhadap realitas di sekelilingnya dan merealisasikan gagasan, target atau proyeknya. Essensi yang terkandung dalam pembangunan masyarakat pada hakekatnya tidak sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitankesulitan yang mereka hadapi, namun lebih dari itu pembangunan masyarakat merupakan usaha untuk membentuk kemandirian mereka, sehingga dapat menghadapi permasalahannya sendiri. Implisit didalamnya, manusia merupakan unsur pokok didalam proses pembangunan. Dengan demikian, selain bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka secara ideal pembangunan masyarakat juga mempersyaratkan adanya partisipasi, kreatifitas dan inisiatif dari masyarakat. Pembangunan akan berhasil guna ketika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat didalamnya. Oleh karena itu, salah satu indicator keberhasilan pembangunan masyarakat juga harus diukur dengan ada atau tidaknya partisipasi masyarakat di dalamnya. Peningkatan kapasitas masyarakat menjadi titik sentral dalam pembangunan masyarakat.

Menurut David C.Korten konsep pembangunan masyarakat pada hakekatnya memiliki beberapa aspek sebagai berikut :

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibuat ditingkat lokal.
2. Fokus utama adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan asset-asset untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi daerah mereka sendiri.
3. Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan mengakui arti penting pilihan nilai individu dan pembuatan keputusan yang telah terdistribusi.

4. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan social dilakukan proses belajar sosial di mana individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris dan dituntun oleh kesadaran kritis individual.
5. Budaya kelembagaan ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur diri sendiri (adanya unit-unit lokal) yang mengelola dirinya sendiri.
6. Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit-unit local yang mengelola diri sendiri, mencakup kelompok penerima manfaat lokal, organisasi pelayanan daerah, pemerintah daerah, bank-bank pedesaan dan lain-lain akan menjadikan basis tindakan-tindakan lokal yang diserahkan untuk memperkuat pengawasan lokal yang mempunyai dasar luas atas sumber-sumber dan kemampuan lokal untuk mengelola sumber daya mereka.

David C. Korten memberi makna terhadap pembangunan sebagai upaya memberikan kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia. Menurutnya, pembangunan selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar tidak dilihat dalam batasan-batasan minimum manusia, yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, tetapi juga sebagai kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara fair, serta tentu saja aktualisasi spiritual. Konsepsi akan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. dalam perspektif agama agaknya cukup relevan dalam konteks ini. beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam rangka mewujudkan semangat ini akan dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, pada intinya upaya-upaya pengembangan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial di mana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi. pengembangan masyarakat, oleh karena itu, tidak berwujud tawaran sebuah proyek usaha kepada masyarakat, tetapi sebuah pembenahan struktur sosial yang mengedepankan keadilan. pengembangan masyarakat pada dasarnya

merencanakan dan menyiapkan suatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Kedua, pengembangan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekadar memberikan kesenangan sesaat dan bersifat tambal sulam. Misalnya, pemberian bantuan dana segar (fresh money) kepada masyarakat hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat tersebut atau timbulnya ketergantungan. Akibat yang lebih buruk adalah tumbuhnya mental “meminta”.

Ketiga, pengembangan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Menurut Soedjatmoko, ada suatu proses yang sering kali dilupakan bahwa pembangunan adalah social learning. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah proses kolektif di mana kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bernegara tidak sekadar menyiapkan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan sosial yang mereka lalui, tetapi secara aktif mengarahkan perubahan tersebut pada terpenuhinya kebutuhan bersama.

Keempat, pengembangan masyarakat, oleh karena itu, tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pengembangan masyarakat, terutama dalam tahapan perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi. Asumsinya, masyarakat yang paling tahu kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.

Kelima, pengembangan masyarakat selalu ditengarai dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Tidak mungkin rasanya tuntutan akan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Oleh karena itu, mesti ada suatu mekanisme dan sistem untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus diberi suatu kepercayaan bahwa tanpa ada keterlibatan mereka secara penuh, perbaikan kualitas kehidupan mereka tidak akan membawa hasil yang berarti. Memang sering kali pemberdayaan masyarakat diawali dengan mengubah dahulu

cara pandang masyarakat dari *rimo ing pandum* (Menerima dengan segala pemberian) menjadi aktif partisipatif.

Dari asumsi dasar tersebut lahirlah hak, nilai, dan keyakinan dalam masyarakat yang harus dihormati, antara lain :

1. Hak menentukan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Hak ini akan muncul karena adanya keyakinan bahwa masyarakat memiliki kemampuan (*viabilitas*) memecahkan masalahnya sendiri.
2. Masyarakat mempunyai hak untuk berusaha menciptakan lingkungan yang diinginkannya dan menolak suatu lingkungan yang dipaksakan dari luar. Penciptaan lingkungan sesuai keinginan ini tetap didasari ketenangan dan ketentraman lingkungan lainnya sehingga dalam diri masyarakat terjadi interaksi sosial aktif dan adaptif. Oleh karena itu, proses pembelajaran selalu lahir dan potensi sosial.

Masyarakat harus diyakini mampu bekerja sama secara rasional dalam bertindak untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitasnya, serta bertindak dalam menggapai tujuan secara bersama. Dengan demikian, dalam pembangunan masyarakat penting untuk memperhatikan karakteristik komunitas dan masyarakat pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan penentuan kontribusi kekuasaan.

3.5.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan.

Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan modal sosial. apabila kita sudah memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer pengetahuan kepada masyarakat. dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan dapat

menguatkan knowledge , modal (money), dan people. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin sustainable dalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how to build the trust) .

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan .
- b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan
- c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).

Jimmu, (2008) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang memungkinkan terjadinya perkembangan ditingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. mereka bergantung pada keteraturan reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada

orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu miliki terhadap masyarakat yang mengembangkan bakat mereka.

Jimmu (2008) menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya khususnya masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur. ini adalah masalah pencocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal sistem pedesaan itu sendiri. Oleh karena itu, agen pembangunan pedesaan harus belajar untuk „menempatkan terakhir terlebih dahulu“ (Chambers, 1983 dalam Jimmu, 2008). Secara teori, peran pemerintah pusat dan agen luar lainnya harus menginspirasi inisiatif lokal bahwa hal itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Passmore 1972 dalam Jimmu, 2008). dalam prakteknya, top-down perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan harus memberi jalan kepada bottom-up atau partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai apa yang disebut „pembangunan melalui negosiasi“. Pengembangan melihat tantangan utama sebagai memanfaatkan selisih melalui memelihara khas lokal kapasitas manusia dan lingkungan itu. Model bottom-up terutama menyangkut mobilisasi sumber daya lokal dan aset. Artinya, masyarakat pembangunan harus dianggap bukan sebagai teori pembangunan, tetapi praktek pembangunan yang menekankan emansipasi dari lembaga yang tidak pantas dan setiap melemahkan situasi yang mengarah pada perias partisipasi, pengembangan masyarakat harus menjadi mekanisme untuk menarik kekuatan kolektif anggota masyarakat tertentu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, mampu dan cacat, dan lain-lain untuk mengubah di wilayah mereka. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sipahelut, 2010). Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable”. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan(power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya.

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat : Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah

menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis diatas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Apabila kita cermati dari serangkaian literatur tentang konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

3.5.3 CSR dalam BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional. terkait dengan hal tersebut, BUMN memiliki peran dalam menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi rakyat.

Selain itu, BUMN juga memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, serta turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. Sebagai salah satu pelaku bisnis, BUMN dituntut untuk dapat menghasilkan laba seperti pada perusahaan bisnis lainnya. akan tetapi di sisi lain BUMN juga dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial (Wibisono, 2007).

Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2003 sebagai ketentuan perundangan terbaru mengenai BUMN, maka dikenal dua bentuk badan usaha milik negara yaitu perusahaan perseroan (Persero) dan perusahaan umum (Perum).

Persero merupakan bentuk BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara dan bertujuan utama untuk mencari keuntungan. Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa sekaligus mengejar keuntungan. Terkait dengan tanggung jawab sosialnya, maka peran sosial BUMN antara lain dituangkan melalui keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep236/MBU/2003. dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan sekitarnya, melalui Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.

Keputusan tersebut pada rinsipnya mengikat BUMN untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Program kemitraan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan usaha kecil dalam bentuk pinjaman dana yang digunakan baik sebagai modal ataupun pembelian peralatan penunjang bagi kegiatan produksi agar usaha kecil menjadi usaha yang mandiri. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah BUMN yang bersangkutan. Sebagai petunjuk dari Kep-236/MBU/2003, terdapat Surat Edaran Menteri BUMN No SE433/MBU/2003 yang berisi bahwa setiap BUMN diisyaratkan membentuk unit tersendiri yang bertugas secara khusus menangani PKBL.

BAB IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

Pemeliharaan adalah salah satu indikator berhasil tidaknya produksi. Oleh sebab itu, perawatan atau pemeliharaan dalam TBM sangat perlu untuk diperhatikan. Adapun perawatan atau pemeliharaan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembersihan piringan, yaitu tindakan perawatan yang bertujuan untuk mengurangi persaingan gulma dan tanaman dalam menyerap unsur hara, air dan sinar matahari. Tujuan lain adalah untuk mempermudah pekerja dalam melakukan pemupukan dan pengontrolan. Area piringan bebas gulma biasanya maksimum 150 cm dari pokok. Sementara itu, gawangan harus bebas dari gulma atau sisa anak kayu.
2. Pemeliharaan tanaman penutup tanah, yaitu mulsa dan tanaman kacang. Tanaman kacang berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah dan menyediakan unsur hara N yang didapat dari simbiosis bakteri rhizobium dibintil akar. Fungsi lain dari penutup tanah atau mulsa adalah menekan pertumbuhan gulma.
3. Pemupukan pada periode TBM bertujuan untuk menambah kebutuhan unsur hara pada tanah. Selain itu tujuan pemupukan juga untuk mencapai pertumbuhan optimal serta ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Pemupukan yang baik untuk dilakukan adalah dengan memenuhi syarat 5T yaitu tepat dosis, tepat jenis, tepat cara, tepat waktu, tepat biaya. Dosis yang diberikan disesuaikan dengan umur tanaman.
4. Kastrasi/sanitasi yang dilakukan tergantung pada kondisi lapangan tetapi pada umumnya kastrasi dimulai pada umur 12-18 bulan dan berakhir pada umur 22- 24 bulan. Bagian tanaman yang dikastrasi adalah bunga jantan dan bunga betina dengan menggunakan egrek kecil.
5. Sensus Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) penting dilakukan secara rutin baik ada hama maupun tidak karena untuk mengetahui serangan hama yang dapat mempengaruhi produksi dari kelapa sawit itu sendiri. Data

yang didapatkan setelah sensus dijadikan acuan untuk melakukan pengendalian apabila serangan melebihi ambang ekonomi.

6. Persiapan sarana panen adalah kegiatan untuk mempersiapkan Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), pasak pikul sebelum melakukan panen pada tanaman menghasilkan dan pengeluaran buah dari dalam kebun ke TPH.
7. Penyemprotan yang dilakukan harus dipastikan aman terhadap tanaman. Penyemprotan piringan dilakukan 2 bulan sekali, anak kayu dicabut, untuk lalang dalam jumlah yang sedikit dikendalikan dengan cara wiping yaitu kain dicelup herbisida dan diusapkan dari pangkal sampai ujung daun lalang kemudian diberi tanda dengan cara ujungnya dirobek sedangkan lalang dengan jumlah banyak disemprot glifosat dengan dosis 100 cc/knapsack.

4.1.1 Kastrasi

Kastrasi adalah perlakuan membuang bunga jantan, bunga betina, dan bunga dompet (kuncup) pada masa periode tanaman belum menghasilkan (TBM). Bunga yang telah patah kemudian dikeluarkan dari ketiak daun dan disusun ke gawangan mati. Alat yang digunakan adalah dodos/chisel



Gambar 2. Alat Kastrasi

Tujuan dilakukannya kastrasi adalah untuk memfokuskan pertumbuhan tanaman ke fase vegetatif. Pelepah yang masih menempel di pasir, pelepah kering atau pelepah yang terbawa dari pembibitan juga dipangkas khususnya pelepah daun yang berada dibagian bawah hingga batas maksimum 15 cm dari permukaan tanah.

Tanaman yang berasal dari PPKS , kastrasi dilaksanakan pada umur 15 bulan sampai 20 bulan dengan rotasi 1 x 1 bulan. Tanaman yang berasal dari PT. Socfindo, kastrasi dilakukan dua tahap :

- Tahap I pada umur 13 – 15 bulan dengan rotasi 1 x 1 bulan, membuang semua bunga jantan dan betina. Pada umur 16 – 17 bulan tidak dilakukan kastrasi untuk menunggu berkembangnya bunga jantan dan betina.
- Tahap II umur 18 – 20 bulan dengan rotasi 1 x 1 bulan hanya membuang bunga betina, sedangkan bunga jantan tidak dibuang untuk merangsang perkembangan serangga penyerbuk kelapa sawit.



Gambar.3. Bunga Dikatrasi

Pada keadaan tertentu untuk bibit yang berasal dari PPKS dimana pertumbuhan tanamannya sangat jagur, kastrasi dapat dilaksanakan sebelum umur 15 bulan dengan membuat surat ke Direksi.

Alat yang digunakan :

- Egrek Kecil

Prosedur Kerja :

1. Sediakan egrek kecil
2. Egrek diarahkan ke bunga jantan/betina/bunga dompet.
3. Lalubunga tersebut dipotong dan dibuang

4.1.1 Pemupukan TBM

Waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan adalah pada awal musim hujan. Pemupukan yang dilakukan pada bulan-bulan curah hujan tinggi akan menyebabkan terjadinya "leaching" (pencucian) yang semakin tinggi atau juga akan menyebabkan terjadinya "run off". Sebaliknya bila pemberian pupuk dilakukan pada musim kemarau maka tanaman akan mampu mengabsorpsi unsur hara dari pupuk yang diberikan. Tujuan dari pemupukan adalah untuk mempertahankan kesuburan tanah dengan memberikan pupuk kedalam tanah sebagai pengganti unsur hara yang telah diambil oleh tanaman. Pupuk yang digunakan untuk pemupukan TBM adalah pupuk NPK. Dosis pupuk pada masing-masing pokok tanaman Kelapa Sawit yaitu 4kg / pokok. Sistem pemupukan dilakukan per jenis pupuk dan tidak dianjurkan mencampur pupuk terlebih dahulu. Pupuk Urea, ZA, MOP (KCL) dan Kieserite, waktu penaburannya boleh berurutan. Dosis pupuk ditentukan berdasar umur tanaman, jenis tanah, kondisi penutup tanah, kondisi visual tanaman. Waktu pemupukan ditentukan berdasar jadwal - umur tanaman. Pada umur satu bulan, ZA ditebar dari pangkal batang hingga 30 - 40 cm. Setelah itu ZA, RP, MOP, dan kiserit ditaburkan merata hingga batas lebar tajuk. Boron ditebarkan di ketiak pelepah daun RP tidak boleh dicampur dengan ZA. RP dianjurkan diberikan lebih dulu dibanding pupuk lainnya jika curah hujan >60 mm. Jarak pemberian RP dengan ZA minimal 2 minggu. Pupuk MOP tidak dapat diganti dengan abu janjang kelapa sawit.

A. Dosis dan Jenis Pupuk Kelapa Sawit Belum Menghasilkan (TBM) di Tanah Podsolik

Table 5. Jenis Pupuk (TBM) di Tanah Podsolik

Umur tanaman (bulan)	ZA	RP	MOP	Kieserit	HGF-Borate
0	-	0.50	-	-	-
1	0.10	-	-	-	-
3	0.25	-	0.15	0.10	-
5	0.25	0.50	0.15	0.10	-
8	0.25	-	0.35	0.25	0.02
12	0.50	0.75	0.35	0.25	-
13	0.50	-	0.50	0.50	0.03
20	0.50	1.00	0.50	0.50	-
24	0.50	-	0.75	0.50	0.05
28	0.75	1.00	0.75	0.75	-
32	0.75	-	1.00	0.75	-
Jumlah	4.35	3.75	4.50	3.70	0.10

Keterangan :

Jika hanya tersedia Urea, maka ZA (21%N) diubah ke Urea (46% N), maka konversinya: $21/46 = 0,47$. Jika petani punya Urea, maka dosis ZA dikalikan 0,47. Contoh: umur 1 bulan perlu Urea $0,1 \times 0,47 = 0,047$ kg/pohon

Urea atau 1/2 ons/pohon Urea. Jadi kebutuhan Urea lebih sedikit dibandingkan ZA, karena kadar N pupuk Urea lebih tinggi dari kadar N pupuk ZA.

Jika petani memiliki pupuk SP-36, maka dapat digunakan sesuai RP (Rock Phospat) dengan catatan kandungan P₂O₅ sama-sama 36%. Namun jika yang tersedia pupuk SP-18, maka dosis RP harus dikalikan $(36/18) = 2$. Jadi jika kebutuhan RP lobang tanam 0,5 maka dikalikan 2 atau $0,5 \times 2 = 1$ kg. Jadi untuk SP-18 diperlukan dosis 1 kg/pohon.

MOP dapat digunakan setara dengan pupuk KCl yang memiliki kadar K₂O 60%. Jika memiliki dolomit (MgO 18%) dan tidak ada Kieserit (MgO 25%), maka aplikasi dolomit sebesar kiserit harus dikalikan $25/18 = 1,4$. Contoh umur sawit 8 bulan memerlukan dolomit sebesar $0,25 \times 1,4 = 0,35$ kg/pohon.

Tabel 6 Rekomendasi dari Balai Penelitian Kelapa Sawit

Umur (Bln)	N.P.K.Mg 15.15.6.4	N.P.K.Mg 13.8.27.4.0.58	Urea	RP	TSP	KCI	Kles	Borax
Lcc				300 kg/ha 500				
Lubang Tanam								
1			200					
3	300							10
TBM 0	300		200	500				10
6			300					20
9	1.000							30
12			400					50
13							150	
15	1.500							50
TBM 1	2.500		700				150	150
18		2.000						75
21			700					
24			1.000		500	1.000	400	100
TBM 2		2.000	1.700		500	1.000	400	175
28			1.250		1.250	1.500	1.000	100
33			1.250			1.500		100
TBM 3			2.500		1.250	3.000	1.000	200

Pemupukan pada TBM dilakukan dengan cara pengeboran atau biasa disebut dengan “pocket”. Pemoketan merupakan kegiatan membuat lubang pada sekitaran tanaman Kelapa Sawit yang berada di areal jurang yang digunakan sebagai tempat meletakkan pupuk. Pemoketan bertujuan agar pupuk yang diberikan tidak mengalami pencucian (leaching) ataupun (run off) akibat hujan . lubang yang di buat pada saat melakukan pemoketan berjumlah 8 lubang pada satu tanaman Kelapa Sawit.

4.2 Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)

4.2.1 Pengendalian OPT

Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) merupakan salah satu kegiatan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman untuk mempertahankan produksi tanaman. Proteksi tanaman perkebunan adalah upaya perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tanaman (hama, penyakit, dan gulma) demi terwujudnya kelangsungan hidup tanaman dan pencapaian sasaran produksi, serta terciptanya kelestarian lingkungan.

4.2.2 Pengendalian Gulma

Gulma-gulma yang terdapat di perkebunan kelapa sawit umumnya gulma berbatang kayu dan gulma berbatang lunak. Gulma yang dikendalikan adalah gulma berbatang kayu seperti sirih-sirihan, paku gajah (*Pteridium esculentum*), paku kawat (*Glichenia linearis*), ganda rusa (*Asystasia intrusa*), lalang (*Imperata cylindrica*), anak kayu dan anakan kelapa sawit. Beberapa cara pengendalian gulma tersebut dengan cara dongkel, oles anak kayu, dan penyemprotan dengan herbisida. Gulma berbatang lunak dibiarkan berada di areal perkebunan seperti paku kadal (*Neprolepis biserata*), jukut pahit (*Paspalum sp.*), dan jenis rumput-rumputan lainnya. Gulma tersebut dapat dimanfaatkan pada areal perkebunan khususnya pada tanaman TM, kegunaannya yaitu untuk menjaga kelembaban tanah (pengganti tanaman kacang-kacangan) dan dapat tumbuh dibawah naungan pohon kelapa sawit, selain itu sebagai inang bagi berbagai jenis musuh alami.

4.2.3 Penyemprotan dengan herbisida

Secara umum, bentuk pengendalian terhadap gulma adalah dengan menggunakan herbisida. Pengendalian gulma dengan herbisida dilakukan pada CPT (*Circle*, Pasar pikul, TPH) dan gawangan. Penyemprotan pada CPT menggunakan herbisida Glyphosate yang bekerja secara sistemik. Kebutuhan herbisida untuk penyemprotan Glyphosate yaitu 500 cc/ha, ally 18 gram/ha, nozzle yang digunakan VLV 100 (100 ml/menit), dosis per kep digunakan 60 cc/kep.. Jumlah tenaga kerja untuk penyemprotan CPT 7 orang dengan estimasi 7 ha.

4.2.4 Penunasan (Pruning)

Tunas pokok (pruning atau pemangkasan) merupakan salah satu pekerjaan kultur teknis yang diperlukan dalam upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit. Pekerjaan ini mengandung dua aspek yang saling bertolak belakang, yakni mengusahakan agar pelepah yang masih produktif (daun masih hijau) tetap dipertahankan, tetapi di lain pihak kadangkala harus dipotong untuk mempermudah pekerjaan panen dan memperkecil losses (brondolan tersangkut di pelepah). Kelapa sawit menghasilkan 18-30 pelepah setiap tahunnya, 8-22 pelepah terdapat buah dan sisanya tidak menghasilkan buah. Produktivitas yang tinggi akan tercapai jika penunasan dilakukan dengan cara yang benar, tetapi jika tidak dilakukan justru akan menurunkan produksi. Jumlah pelepah yang optimum untuk menjaga keseimbangan kedua aspek di atas adalah 48 - 56 pelepah (untuk tanaman muda) dan 40 - 48 pelepah (tanaman tua). Dengan demikian pemakaian kapak untuk panen di tanaman muda tidak dibenarkan dan harus digunakan dodos. Akan tetapi pada tanaman teruna dan tua (umur > 8 tahun), tidak dapat dihindarkan penggunaan egrek untuk panen sehingga terpaksa dilakukan pemotongan pelepah-pelepah produktif.



Gambar 4. Penunasan

Penunasan dilaksanakan untuk mempertahankan jumlah pelepah daun sesuai umur tanaman, mempertahankan luas permukaan daun untuk proses fotosintesa, mempermudah pelaksanaan panen dan mencegah kehilangan brondolan yang sangkut di ketiak pelepah.

Tunas Selektif :

- Penunasan dilaksanakan pada TM-1 s/d TM-4.
- Menunas pelepah yang tidak berfungsi yaitu pelepah yang terletak rata dengan tanah dan telah menguning/mengering.
- Jumlah pelepah yang dipertahankan adalah 56 – 64 pelepah.
- Pemotongan pelepah dilakukan rapat ke pangkal pelepah dan bidang potong berbentuk tapak kuda yang miring keluar membentuk sudut 15° s/d 30° terhadap bidang datar, untuk menghindari tersangkutnya brondolan diketiak pelepah.
- Pelepah yang telah ditunas, dipotong 3 (tiga) bagian lalu dikumpulkan dan dirumpukkan diantara tanaman (didalam barisan) pada areal datar sampai dengan bergelombang. Pada areal perengan pelepah tidak dipotong dan

dirumpuk diantara barisan tanaman dengan posisi tegak lurus (melintang) terhadap kemiringan yang bertujuan untuk mengurangi erosi permukaan.

Tunas pemeliharaan/rutin (periodik) :

- Dilaksanakan rutin pada tanaman menghasilkan (TM) > 4 tahun.
- Tanaman yang belum mencapai ketinggian tandan matang panen 90 cm dari permukaan tanah tidak dibenarkan ditunas rutin.
- Standard pelepah yang dipertahankan berdasarkan umur tanaman yaitu:
 - a. Umur tanaman < 8 tahun jumlah pelepah 56 – 64 atau songgo 3 (tiga) yaitu sistem pengelolaan pelepah dengan cara mempertahankan minimal 3 (tiga) pelepah di bawah tandan tertua tidak dibenarkan dipotong.
 - b. Umur tanaman > 8 tahun jumlah pelepah 48 – 56 atau songgo 2 (dua) yaitu sistem pengelolaan pelepah dengan cara mempertahankan 2 (dua) pelepah di bawah tandan tertua tidak dibenarkan dipotong.
- Pemotongan pelepah dilakukan rapat ke pangkal pelepah dan bidang potongan berbentuk tapak kuda yang miring ke luar membentuk sudut 15° s/d 30° terhadap bidang datar.
- Pangkal pelepah bekas tunasan yang menempel pada pohon harus kurang dari 5 cm untuk menghindari tersangkutnya brondolan diketiak pelepah.
- Pelepah yang telah ditunas dipotong 3 (tiga) bagian lalu dikumpulkan dan dirumpuk diantara tanaman (dalam barisan) pada areal datar sampai dengan bergelombang.
- Pada areal piringan pelepah tidak dipotong dan dirumpuk diantara barisan tanaman dengan posisi tegak lurus (melintang) terhadap kemiringan yang bertujuan untuk mengurangi erosi permukaan.
- Tumpukan berkayu yang tumbuh dipohon dipotong dekat pangkal pelepah dan dirumpuk bersamaan dengan rumpukan pelepah.
- Rotasi pekerjaan tunas rutin 9 bulan.

A. Tujuan penunasan :

- mempermudah pekerjaan panen.
- menghindari tersangkutnya brondolan pada ketiak pelepah.
- memperlancar proses penyerbukan alami.

- mempermudah pengamatan buah matang pada saat pekerjaan panen.
- melakukan sanitasi (kebersihan) tanaman, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak sesuai bagi perkembangan hama dan penyakit.
- pada tanaman muda (tunas pasir) mempermudah pemupukan, pembersihan piringan, dan pengutipan brondolan.

4.2.5 Pengendalian Hama Ulat Api

Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) adalah hama dari ordo lepidoptera yang menyerang fokus pada daun kelapa sawit. UPDKS mengalami metamorfosis holometabola melalui; Telur – Ulat – Kepompong – Ngekat.

Gejala serangan dari ulat api (larva) adalah dimulai dari tepi daun yang tampak bekas gigitan hingga serangan berat yang menyebabkan daun lidi. Bekas serangan terlihat jelas seperti jendela-jendela memanjang pada helaian daun, sehingga akhirnya daun yang terserang berat akan mati kering seperti bekas terbakar.

Pengendalian hama ulat api dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Pengendalian secara mekanik dilakukan secara manual dengan mengutip larva ulat api. Kegiatan yang kami lakukan untuk pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan Fogging pada tanaman kelapa sawit pada tanaman TM menggunakan Astertrin 250 EC dengan dosis 250 cc/Ha, emugaltor/ perekat 50cc/Ha, solar 1,5 l/ Ha .Satu tangki mesin fogging berisi 5 liter (5 liter untuk 2 Ha) dengan teknik penyemprotan dimulai dari bawah tanaman hingga ke atas. Pengaplikasian ini menggunakan mesin fogging (Ternal Fogger) dilakukan pada malam hari pada pukul 22.00 WIB – 05.00 WIB. Hal ini dikarenakan belum ada aktivitas manusia, kelembaban yang tinggi dan udara tenang untuk mengefisienkan bahan pengasapan dan asap tidak mudah terurai.



Gambar 5. Kegiatan Fogging

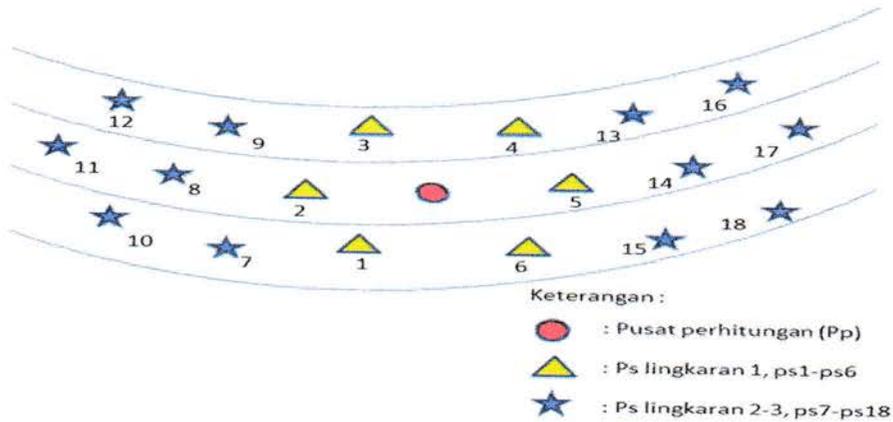
Sebelum dilakukan pengendalian, terlebih dahulu dilakukan pengamatan (monitoring) dan sensus populasi ulat api. Terdapat 2 jenis pengamatan yaitu pengamatan global dan pengamatan efektif. Pengamatan global dilakukan setiap bulan meskipun tidak ada serangan ulat api, jumlah sampel minimal 2 pelepah (pelepah daun atas dan tengah)/ 1 pohon/ hektar, dihitung jumlah larva pada setiap pelepah, populasi kritis 5-10 ulat/pelepah. Sedangkan pengamatan efektif dilakukan hanya pada blok dengan populasi si atas pada populasi kritis, jumlah sampel minimal 5 pelepah/ 5 pohon sampel/ ha, pengamatan efektif dilakukan setelah dicapai populasi kritis, dan bila populasi ulat melebihi populasi kritis berarti populasi telah melebihi Ambang Ekonomi. Untuk tanaman yang telah menghasilkan pengendalian ulat api dilakukan dengan cara *fogging* (pengasapan).

4.2.6 *Global Telling*

Global telling adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi serangan hama pada tanaman kelapa sawit. *Global telling* dilaksanakan setiap bulan untuk seluruh jenis hama kelapa sawit baik Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS), tikus, rayap, dan hama lainnya pada pohon-pohon sampel yang sama.

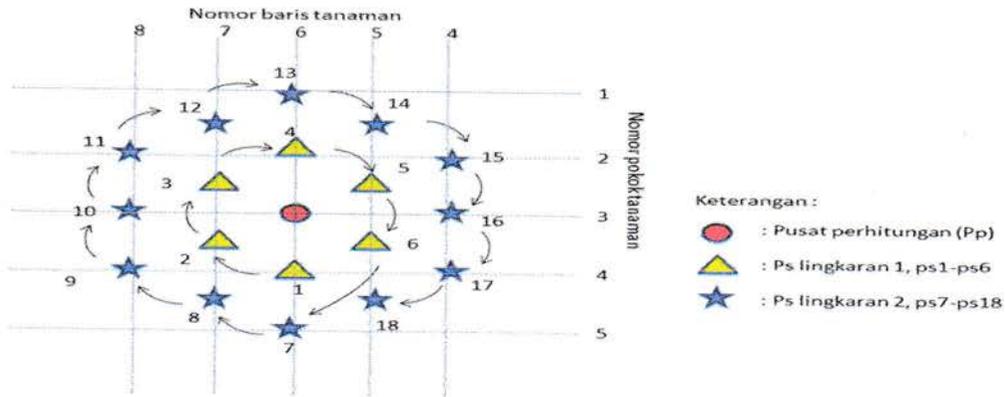
Dalam *global telling* perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Dalam *global telling* perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:



- Unit Sampel (US) adalah pohon-pohon yang digunakan sebagai sampel untuk mengetahui tingkat serangan hama pada satuan luas tertentu (luas 1 US biasanya mewakili areal kurang lebih satu hektar). Pada US terdiri atas pohon Pusat perhitungan (Pp) dan Pohon sampel (Ps).
- Pusat perhitungan (Pp) adalah pohon yang digunakan sebagai pusat perhitungan sampling dari 1 (satu) hektar luasan tanaman kelapa sawit, dan Pohon Sampel (Ps) adalah pohon yang mengelilingi Pp sebanyak 2 (dua) lingkaran. Apabila dalam 1 blok luasnya 25 hektar, maka jumlah Pp pada blok tersebut adalah 25 pohon.
- Dalam satu blok, nomor Pp setara dengan luas blok tersebut. Pp pertama adalah pohon pada baris ke-6 pohon ke-3, Pp kedua adalah baris ke-6 pohon ke 14 (interval 11 pohon) demikian seterusnya sampai blok dalam baris tersebut berakhir. Untuk menentukan Pp selanjutnya adalah dengan membuat interval baris sebanyak 13 pohon untuk pola tanam 143 (baris ke-6, 19, 32, 45, 58) dan 12 pohon untuk pola tanam 132 (baris ke-6, 18, 30, 42, 54). Apabila US telah sampai pada batas ujung blok, maka untuk menentukan US selanjutnya ditentukan dengan jarak terdekat dengan interval baris yang sama. Untuk pola tanam lain agar menyesuaikan.

Urutan pokok tanaman dan nomor baris tanaman dalam *global telling* perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :



- Urutan penomoran Ps adalah searah jarum jam. Ps lingkaran 1 sejumlah 6 pohon (Ps1 – Ps6), yaitu pohon yang berada paling dekat dengan Pp. Ps lingkaran 2 adalah pohon yang mengelilingi Ps lingkaran 1. Ps lingkaran 2 terdiri atas 12 pohon yang selanjutnya disebut Ps7 – Ps18.
- Untuk areal dengan terasan, jumlah unit sampel tetap 1 US untuk satu hektar. Pada areal dengan terasan lebih dari tiga, penempatan PP dan PS hanya dilakukan pada tiga terasan.
- Apabila Ps yang ada di blok tersebut tidak lengkap maka digantikan dengan pohon terdekat.
- Untuk mempermudah pelaksanaan *global telling* di lapangan, pada setiap Pp dan Ps diberi tanda dan nomor dan ditempatkan di bawah nomor pohon. Tanda untuk Pp yaitu “”, untuk Ps lingkaran 1 (Ps1 - Ps6) yaitu “”, dan untuk Ps lingkaran 2 (Ps7 – Ps18) yaitu “”.

Unit sampel (US) dalam *global telling* yang terdiri dari Pusat perhitungan (Pp) dan Pohon sampel (Ps) dalam *global telling* pada areal rata sampai bergelombang. Unit sampel (US) dalam *global telling* yang terdiri dari Pusat perhitungan (Pp) dan Pohon sampel (Ps) dalam *global telling* pada areal terasan lebih dari tiga



Gambar 7.(a) Pohon Pusat perhitungan; (b) Pohon Ps Lingkaran 1; (c) Pohon Ps Lingkaran 2-3

Cara melakukan *global telling*:

- dilakukan pada US (Pp dan Ps) yang telah ditentukan untuk menentukan tingkat serangan hama ulat pemakan daun kelapa sawit, tikus, kumbang tanduk, dan hama lainnya.
- Petugas *global telling* melakukan pengamatan semua serangan hama pada pohon Pp dan atau Ps.

Untuk mengetahui tingkat serangan UPDKS, diambil satu pohon Pp atau Ps dengan tingkat serangan paling tinggi, apabila serangan rendah maka penentuannya diatur secara bergilir tiap bulan dari Pp, Ps-1 sampai Ps18. Cara menghitung ulat pada pelepah tanaman yang tidak bisa dijangkau dengan tangan adalah dengan memotong pelepah yang ditaksir mempunyai paling banyak ulatnya, apabila serangan rendah maka diambil pelepah ke-25. Pada populasi UPDKS tinggi (> 100 ulat/pelepah) perhitungan dibatasi pada sebelah pelepah saja dan hasilnya dikalikan dua. Perhitungan tingkat serangan dihitung berdasarkan US masing-masing, sehingga dalam satu blok dapat terjadi berbagai tingkat serangan.

Tindakan pengendalian ulat dengan cara kimiawi dilakukan apabila tingkat serangan UPDKS mulai mencapai tingkat serangan sedang. Untuk mengetahui tingkat serangan tikus, dilakukan perhitungan pada Pp dan seluruh Ps (19 pohon). Tingkat serangan tikus dihitung berdasarkan gejala serangan baru, yaitu serangan yang pada saat *global telling* sebelumnya belum ada.

Perhitungan tingkat serangan tikus dilakukan per blok, sebagai contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Serangan Tikus

Persentase Tingkat Serangan (%)	Kategori Serangan
< 5	Bebas
5-15	Ringan
>15-25	Sedang
>25	Berat

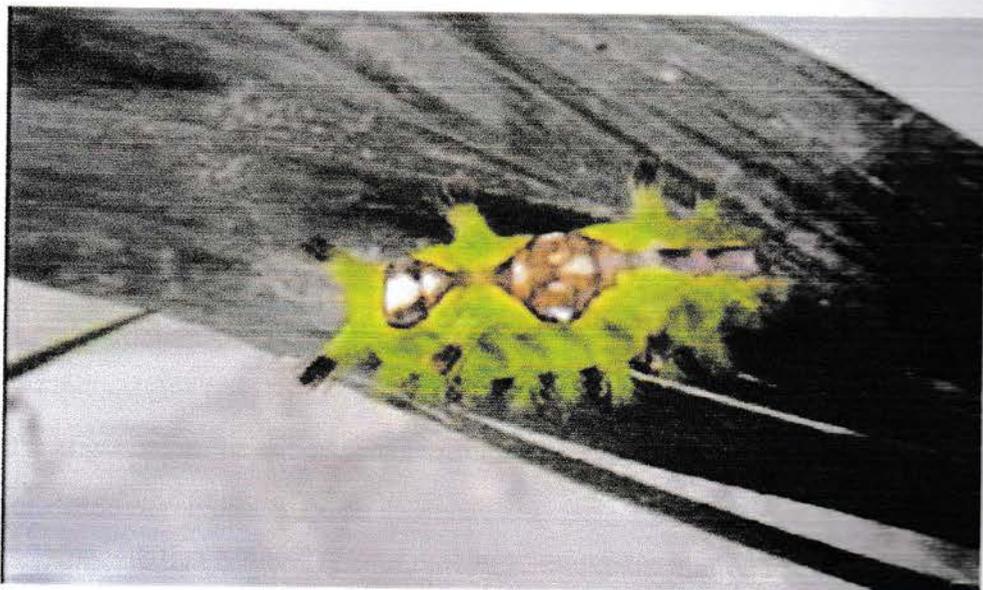
4.2.7 Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS)

Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) adalah hama dari ordo lepidoptera yang menyerang fokus pada daun kelapa sawit. UPDKS mengalami metamorfosis holometabola melalui; Telur – Ulat – Kepompong – Ngegat.

Adapun jenis UPDKS yang sering menyerang pada pertanaman Kelapa Sawit :

- Ulat Api
- Ulat Bulu

Jenis ulat api yang dulu pernah ada di PTPN IV Kebun Sei Kopas adalah jenis *Setora nitens* dan *Birthosea bisura*. Jenis ulat kantung adalah *Metisa plana*, dan jenis ulat bulu adalah *Calliteara horsefieldii*.



Gambar 8. Hama / Ulat Api

Gejala serangan dari ulat api (larva) adalah dimulai dari tepi daun yang tampak bekas gigitan hingga serangan berat yang menyebabkan daun lidi. Tetapi serangan dari ulat kantong berupa lubang-lubang pada bagian tengah daun hingga serangan parah daun habis. Gejala serangan ulat bulu sama dengan serangan ulat api, tapi tidak separah serangan ulat api.

Secara umum pengendalian UPDKS sebaiknya dilakukan sebelum hama menjadi ngengat ataupun sebelum hama ditemukan berada pada semua tahap metamorfosisnya. Hal itu dikarenakan jika hama sudah ditemukan dalam semua tahap, maka akan sangat sulit dalam hal pengendaliannya.



Gambar 9. Gejala Serangan Ulat Api

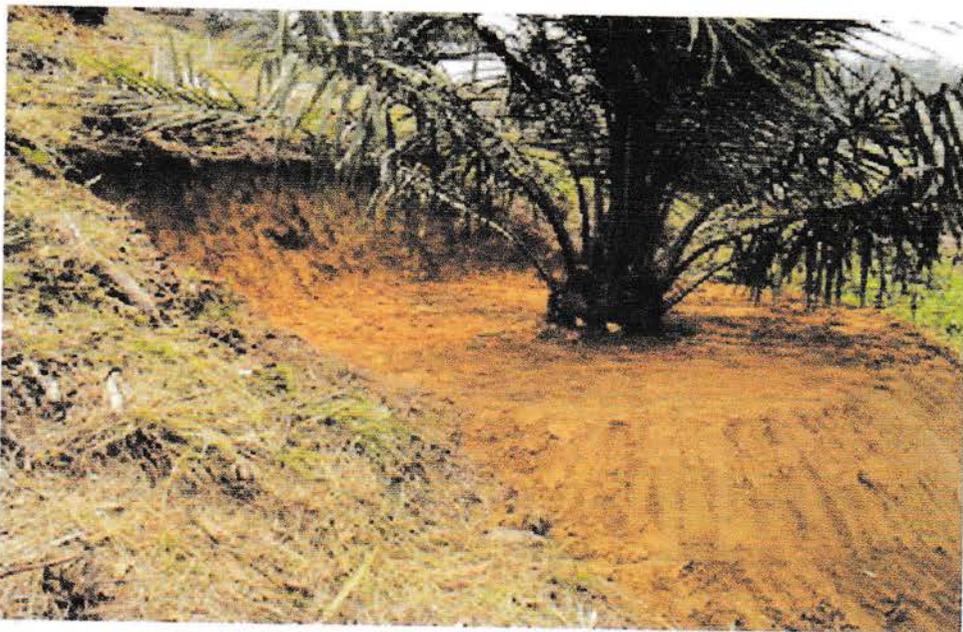
Cara pengendalian UPDKS :

1. Ulat api dan Ulat Bulu
 - Pengendalian hayati : Menanam tanaman penarik bunga air mata pengantin (*Antigonon leptopus*)
 - Pengendalian Manual (*Hand picking*) : mengutip ulat dan kepompong.
 - Pengendalian Biologi : Menggunakan predator alami seperti semut api.
 - Pengendalian Mekanis : Menggunakan perangkap cahaya (*light trap*).

- Pengendalian Kimiawi : Penyemprotan pestisida (*fogging*) yang dilakukan pada pukul 22.00 WIB – 05.00 WIB. Hal ini dikarenakan belum ada aktivitas manusia, kelembaban yang tinggi dan udara tenang untuk mengefisienkan bahan pengasapan dan asap tidak mudah terurai.

4.2.8 Pembersihan piringan (*racking*)

Racking adalah kegiatan membersihkan piringan dari sampah dengan tujuan untuk mempermudah pengamatan brondolan yang jatuh, mempermudah pemupukan. Piringan adalah bundaran yang mengelilingi pangkal batang kelapa sawit yang harus bersih menurut ukuran tertentu sesuai dengan umur tanaman. Lebar piringan adalah 2 m dari batang kelapa sawit.



Gambar 10. Piringan Kelapa Sawit

Pengendalian gulma pada daerah piringan bertujuan untuk :

- Mendukung dan memacu pertumbuhan kelapa sawit dengan mengurangi kompetisi dari gulma terhadap air, hara, dan cahaya matahari
- Memudahkan operasi pemeliharaan dan pemanenan yang efektif
- Menciptakan piringan yang bersih bagi pengumpulan buah / brondolan

Pekerja yang melakukan racking adalah wanita dengan alat bernama garu.

Arah pembersihan piringan berbentuk circle dan kemudian kotoran dikumpul

pada gawangan mati. Pengerjaan racking mencapai 120 tanaman/hari dengan rotasi pembersihan adalah 2 kali.

4.2.9 Pemupukan pada Tanaman Menghasilkan (TM)

Tanaman kelapa sawit memerlukan banyak unsure hara yang dapat dikategorikan kedalam dua kelompok yaitu :

- Unsur hara mikro terdiri dari *Nitrogen (N)*; *Phosphorus (P)*; *Potassium (K)*; *Magnesium (Mg)*; *Sulphur (S)*; *Calcium (Ca)*; *Chlorine (Cl)*; dan *Sodium (Na)*.
- Unsur hara mikro terdiri dari *Manganese (Mn)*; *Iron (Fe)*; *Zinc (Zn)*; *Copper (Cu)*; *Molybdenum (Mo)* dan *Boron (B)*

Pada Perkebunan PT. Sei Kopas Pupuk yang paling sering digunakan adalah NPK dan Dolomit .Pemupukan Dolomit dan NPK dilakukan secara bergantian. Pemupukan NPK dilakukan dengan cara pengeboran atau disebut juga dengan pocket. Pemoketan merupakan kegiatan membuat lubang pada sekitaran tanaman Kelapa Sawit yang berada di areal jurang yang digunakan sebagai tempat meletakkan pupuk. Pemoketan bertujuan agar pupuk yang di berikan tidak mengalami pencucian (leaching) ataupun (run off) akibat hujan . lubang yang di buat pada saat melakukan pemoketan berjumlah 8 lubang pada satu tanaman Kelapa Sawit.

Pemupukan sangat penting dilakukan pada tanaman kelapa sawit baik itu NPK , Dolomit ataupun Pupuk lainnya. Karna selain hara dari tanah pupuk merupakan sumber hara yang paling penting bagi tanaman . Maka dari itu pupuk sangat mempengaruhi tanaman baik itu keadaan pertumbuhan , jumlah produksi buah dan kualitas produksi itu sendiri.



Gambar 11. Pengeboran / Pemoketan Untuk Pemupukan

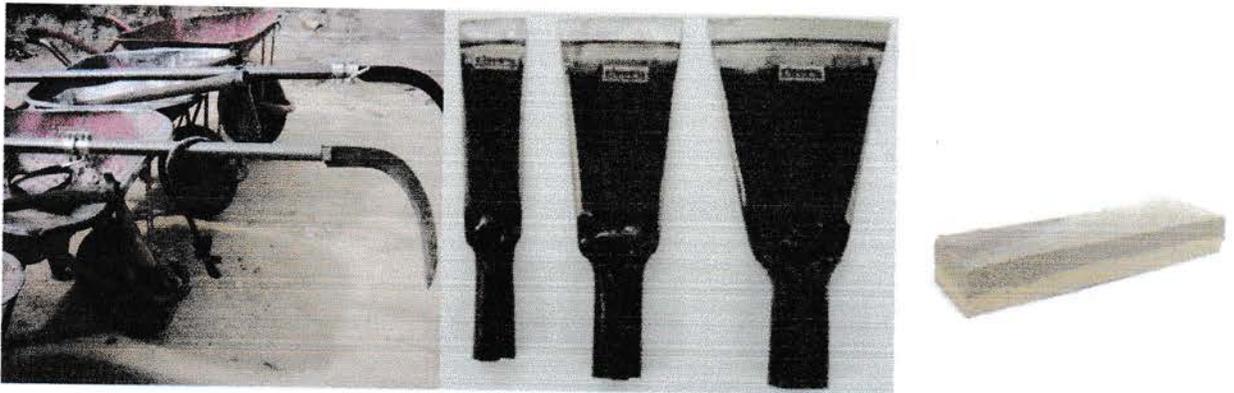
4.3 Pasca Panen

4.3.1 Kriteria Matang Panen

Kriteria matang panen adalah persyaratan kondisi tandan yang ditetapkan untuk dapat di panen, dan kriteria panen yang berlaku di PTPN IV Sei Kopas adalah 5 brondolan yang jatuh secara alami di piringan, brondolan kering atau yang sakit tidak bisa dijadikan dasar sebagai kriteria matang panen. Dan ketentuan bersih panen yang di lakukan pemanen yaitu tidak boleh tandan dan brondolan tinggal di piringan.

4.3.2 Alat alat Panen

Semua kebutuhan alat panen disediakan Perusahaan kecuali untuk pemanen tenaga pemborong. Untuk panen diareal tanaman muda (3-5 tahun) diperlukan alat chisel (dodos dengan lebar 8 cm), kampak dan alat pikul, kereta sorong atau sepeda, gancu dan goni. Sedangkan untuk panen diareal tanaman dewasa dan tua (> 5 tahun) diperlukan alat kampak, egrek, bambu/galah egrek, tali, alat pikul, kereta sorong atau sepeda, gancu dan goni. Untuk membentuk gagang cengkem kodok (V) diberikan kampak tomasson (bentuk V).



Gambar 12 : Alat-alat Panen

4.3.3 Rotasi Panen

Rotasi panen yang dilakukan di PTPN IV Unit Sei Kopas adalah 5/7 hari di semester I dan 6/7 di semester II. Jika rotasi panen semakin lama, maka akan banyak buah over ride yang menyebabkan kandungan air tinggi dan kandungan asam lemak jenuh tinggi. Biasanya buah over ride terjadi karena buah tinggal dan hari libur nasional.

4.3.4 Hancak Panen

Sistem panen di kebun kelapa sawit PTPN IV Unit Sei Kopas menggunakan sistem hancak tetap dan hancak giring tetap. Sistem hancak tetap yaitu pemanen telah diberi luasan lahan panen yang sudah ditentukan sedangkan hancak giring tetap setiap hari hancaknya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan lapangan. Luas maksimal hancak seorang pemanen adalah 2,5 Ha atau sekitar \pm 8 baris pada blok yang luasnya 20ha (400 m x 500 m).

4.3.5 Persiapan Panen

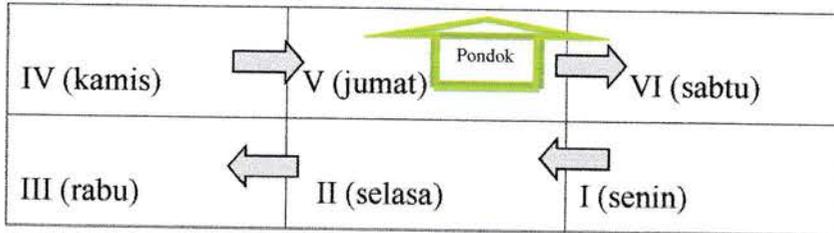
- Penetapan Putaran Panen

Putaran panen 7 hari dengan rumus standart 5/7 untuk semester I dan 6/7 untuk semester II. Hal ini dikarenakan pada semester II diperoleh lebih banyak TBS. Penomoran Kapveld memakai huruf Romawi.

- Penyusunan Kapveld panen

Penyusunan kapveld panen ditentukan berdasarkan letak pondok pada kebun, pada afdeling IV kebun Sei Kopas untuk kapveld panen yang dekat pondok kebun dilaksanakan pada hari jumat atau kapveld ke V dengan putaran panen 6/7.

Peta kapveld dapat dilihat pada gambar berikut:



Peta Kapveld

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan panen dilakukan searah jarum jam, dikarenakan apabila pada kapveld V panen belum selesai maka dapat dilanjutkan esok harinya sebelum masuk ke kapveld VI.

- Perencanaan Panen Harian

Perencanaan panen harian dibuat berdasarkan Angka Kerapatan Panen (AKP) yang dilaksanakan 1 hari sebelum pelaksanaan panen pada kapveld yang telah ditentukan.

Angka Kerapatan Panen (AKP) adalah suatu satuan yang menggambarkan rata-rata tandan matang panen perpohon dan penyebaran tandan matang panen. Kegunaan AKP adalah untuk memperkirakan produksi yang dipanen, menghitung kebutuhan tenaga pemanen dan jumlah pengangkutan.

Tata cara penghitungan AKP :

- a. Tetapkan blok sample untuk setiap kapveld
- b. Satu blok sample untuk setiap tahun tanam dalam 1 kapveld max 50 Ha.
- c. Pohon yang diamati 10% dari jumlah pohon dalam 1 blok sampel.
- d. Tetapkan baris sampel dalam setiap blok sampel.
- e. Seluruh pohon dalam barisan sampel diperiksa dan dicatat jumlah tandan matang panen.

f. Rumus perhitungan AKP = $\frac{\text{Jumlah pohon sampel: 1}}{\text{Jumlah tandan buah matang}}$

g. Contoh perhitungan AKP :

Jumlah pohon sample = 170 pohon

Jumlah tandan matang = 34 tandan

Maka AKP = $\frac{\text{Jumlah pohon sampel 170: 1}}{\text{Jumlah tandan buah matang 34}}$

= 1 : 5 artinya terdapat 1 TBS matang panen dalam 5 pohon

h. Estimasi produksi dapat dihitung dari rata-rata tandan matang panen per pohon x jumlah pohon dalam 1 blok x RBT.

4.3.6 Cara Panen

Cara Pemanenan Tandan Kelapa Sawit

- Tentukan tandan kelapa sawit yang sudah sesuai dengan kriteria matang
- Egrek diarahkan ke pelepah penyokong tandan yang matang searah dengan arah spiral dan di potong
- Tangkai tandan kelapa sawit dipotong sampai tandan terjatuh
- Tangkai tandan kelapa sawit dipotong dengan membentuk huruf "V" dengan menggunakan kapak
- Pelepah yang telah dijatuhkan kemudian dipotong menjadi 3 bagian dan disusun di tempat penumpukan pelepah yang berada di antara pohon kelapa sawit
- Brondolan kelapa sawit yang berada di piringan, pelepah atau sekitar kelapa sawit dikutip, jangan sampai ada yang tertinggal.
- Tandan kelapa sawit diangkut ke tempat pengumpulan hasil (TPH) menggunakan angkong
- Pada semua tangkai bekas potongan tandan kelapa sawit ditulis kode mandor dan nomor pemanen dengan memakai pensil kopi atau alat tulis yang lain.

Contoh : A/6

A = Kode mandor 6 = Nomor pemanen

- Jumlah TBS per TPH dan tanggal panen juga dituliskan pada tangkai bekas potongan tandan kelapa sawit dan ditempatkan di atas karung brondolan atau di atas susunan tandan kelapa sawit.

Contoh : 16/20

16 = Tanggal panen 20 = Jumlah TBS per TPH



Gambar 13. Hasil Panen di TPH

4.4 Administrasi Afdeling

Administrasi afdeling adalah seluruh kegiatan yang mencakup pelaksanaan prosedur, sistem maupun tata cara yang dilakukan oleh afdeling dalam rangka mencapai tujuan usaha perkebunan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh kegiatan yang mencakup pelaksanaan prosedur, sistem maupun tata cara yang dilakukan oleh seseorang atau badan tertentu dalam rangka mencapai tujuan usaha

Afdeling adalah bagian dari kebun atau pabrik gula yang dipimpin oleh seorang sinder. Kebun atau pabrik gula adalah unit usaha di bumi yang dipimpin oleh seorang administrator.



Gambar 14. Buku Administrasi

- PB 73 = Buku mandor yang berisi kehadiran karyawan yang bekerja setiap harinya. Biasanya ada 2 buku, yakni buku tanggal ganjil dan buku tanggal genap.
- AU 29 = Buku asisten yang merupakan hasil rekapan dari PB 73.
- PB 24A = Buku yang mengumpulkan dan mencatat hasil buah dari lapangan yang diperoleh oleh para pemanen oleh mandor panen yang diisi setiap hari.
- PB 25 = Berupa surat pengantar TBS, dimana hasil pengumpulan seluruh buah dari semua TPH dicatat sebelum dikirim ke PKS, yang dicatat oleh KCS
- PB 24B = Buku yang berisi catatan pengumpulan buah yang dikutip dari TPH per pemanen yang diisi oleh KCS (Krani Transport).
- PB 26 = Berupa catatan realisasi berat hasil panen per pemanen/TPH yang diisi oleh Krani produksi dan mandor
- PB 10 = Buku yang berisi catatan keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam satu hari. Hasil rakapan dari setiap buku mandoran.
- PB 11 = Berupa catatan yang akhirnya menentukan premi setiap karyawan, yang nantinya akan mengelurakan slip gaji.
- PB 27 = Berupa catatan produksi per blok, pemakaian HK per blok dan kg/HK
- LM 76 = Merupakan laporan dari afdeling yang dikirim ke kantor kebun. Kemudian kantor kebun akan mengirim laporan keseluruhan tiap afdeling ke kantor direksi.

- AU 58 = Surat peminjaman gudang.

Keterangan :

PB = Pengawasan Biaya

AU = Akuntansi Umum

LM = Laporan Manajemen

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Unit Usaha Sei Kopas merupakan salah satu Unit Usaha PTPN IV di bawah naungan GU-I yang berada di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.
2. Luas yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Unit Usaha Sei Kopas yaitu 6.979,72 Ha dan Luas kebun untuk menanam tanaman kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Sei Kopas adalah 4.918,00 Ha yang terdiri dari tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan.
3. Tanaman Kelapa sawit pada PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Unit Usaha Sei Kopas adalah tahun tanam 1999–2016. Bahan Tanam : D X P-MRS, Socfindo ditanam dengan pola segitiga (Straight Line) pada areal rata dan sistem teras di daerah jurang.
4. Selama kegiatan praktek kerja lapangan di PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Unit Usaha Sei Kopas, Kegiatan yang dilakukan adalah Pemanenan, Pemupukan, Pengendalian Hama dan Gulma, Penunasan, Kastrasi, dan Tunas Pasir.
5. Selama kegiatan PKL dilaksanakan, pengalaman yang berharga didapat dari proses kegiatan PKL. Pengalaman terjun langsung dilapangan menambah pengetahuan tentang perkebunan, dimana tanggung jawab pihak perkebunan diatur berdasarkan SPO.

5.2 Saran

1. Kami menyarankan agar memperbaiki jalan serta penanganan pengangkutan karena sangat berpengaruh terhadap TBS yang restan.
2. Memberikan motivasi serta pemberdayaan karyawan guna terciptanya kesejahteraan di lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Unit Usaha Sei Kopas.

3. Adanya perbaikan tata kelola terhadap atau manajemen untuk peningkatan produksi.
4. Membina kekeluargaan yang lebih dekat antara para pimpinan dengan para karyawan begitu juga sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, 2012. Budidaya Tanaman kelapa Sawit. Dalam Tanaman Kelapa Sawit adobe reader.co.id diakses pada tanggal 21 September 2017.
- Hadi, 2004 Pemeliharaan TBM dan TM Tanaman kelapa sawit. Dalam Pemeliharaan TM dan TBM adobe reader.co.id diakses pada 21 September 2017.
- Herlina, 2002 Pedoman Budidaya Tanaman Kelapa Sawit. Dalam Budidaya Tanaman Kelapa Sawit adobe reader.co.id diakses pada 21 September 2017.
- Junaidi, 2004 Eksploitasi Penyadapan Tanaman sawit. Dalam Budidaya Tanaman Sawit adobe reader.co.id diakses pada 21 September 2017.
- Lubis, 1992 Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit. Dalam Pemeliharaan Kelapa Sawit adobe reader.co.id diakses pada 21 September 2017.
- Harahap, D. 2010. Standar Prosedur Operasi (SPO) Pengolahan Kelapa Sawit. Medan. (ID:) PTPN 4.
- PTPN IV. 2018. *Selayang pandang Semester A dan B*. Unit Sei Kopas
- . 2007. *Standar Prosedur Operasi (SPO)*. Medan
- . 2015. *Pedoman Pengendalian Hama Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit*. Medan
- Setyamidjaja, D. 1993. *Budidaya Kelapa Sawit*. Kanisius. Yogyakarta

LAMPIRAN TABEL

A. Uraian Pelaksanaan (Realisasi) Kegiatan PKL

TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
Senin 22-Juli-2019	-	-
Selasa 23-Juli-2019	Mengantar surat praktik kerja lapangan ke pihak sdm dan manager	<ul style="list-style-type: none"> - Surat diterima oleh pihak sdm yang bernama bapak Adam Purba, kemudian diproses dan diteruskan ke bapak Manager.
Rabu 24-Juli-2109	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarahan & pengenalan mahasiswa PKL UMA - Pemberian materi tentang panen (TM) oleh Bapak Yudi Irfansyah, Sp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarahan dilakukan dipagi hari sebelum dimulai kegiatan di lapangan. Pengarahan dilakukan diruangan bapak Manager bersama para karyawan pimpinan PTPN IV unit kebun SeiKopas. - Pemberian materi yang diberikan oleh Bapak Yudi Irfansyah ,SP selaku Asisten tanaman Afdeling VIII dan langsung diarahkan kelapangan.

<p>Kamis 25-Juli-2019</p>	<p>Pengarahan tentang materi panen (TM) yang diberikan oleh Bapak Yudi Irfansyah, SP selaku Asisten Tanaman di afdeling VIII di PTPN IV unit kebun Sei Kopas.</p>	<p>- Diskusi dengan asisten afdeling VIII bapak Yudi Irfansyah, SP tentang kegiatan-kegiatan pemanenan (TM) yang di tinjau kelapangan kemaren</p>
<p>Jumat 26-Juli-2019</p>	<p>Pengarahan/materi yang akan disampaikan tentang cara memupuk oleh Bapak Yudi Irfansyah , SP selaku Asisten Tanaman afdeling VIII di PTPN IV unit kebun Sei Kopas.</p>	<p>Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan kelapangan yang di pandu oleh mandor I afdeling VIII dan melihat secara langsung proses pemupukan.</p>
<p>Sabtu 27-Juli-2019</p>	<p>Pemberian materi tentang pemupukan</p>	<p>Aktivitas masih dilakukan di afdeling VIII, diskusi dengan asisten afdeling VIII bapak Yudi Irfansyah, SP tentang kegiatan selama pemupukan dikantor.</p>
<p>Minggu 28-Juli-2019</p>	<p>Istirahat</p>	<p>.</p>
<p>Senin 29-Juli-2019</p>	<p>Pemberian tentang materi Chemist di afdeling VIII.</p>	<p>Aktivitas masih dilakukan di afdeling VIII yang disampaikan tentang kegiatan selama chemist yang dipandu oleh mandor I afdeling VIII</p>

Selasa 30-Juli-2019	Pemberian materi tentang chemist di afdelig VIII.	Aktivitas masih dilakukan di kantor afdeling VIII, diskusi dengan asisten afdeling VIII bapak Yudi Irfansyah, SP tentang kegiatan selama chemist di lapangan.
Rabu 31-Juli-2019	Kegiatan dilakukan di Afdeling VIII untuk materi pengangkutan/transportasi.	Aktivitas masih dilakukan di afdeling VIII yang dipandu oleh mandor I. Materi yang disampaikan pengangkutan kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan kelapangan dan melihat secara langsung proses pengangkutan.
Kamis 1-Agustus-2019	Pemberian materi tentang pengangkutan.	Aktivitas masih dilakukan di afdeling VIII, diskusi dengan asisten afdeling VIII di kantor oleh bapak Yudi Irfansyah, SP tentang kegiatan selama pengangkutan di lapangan.
Jumat 2-Agustus-2019	Pemberian materi tentang kerapatan panen	Pemberian materi tentang kerapatan panen oleh Bapak Yudi Irfansyah di Afdeling VIII tentang kerapatan panen dan perhitungan kerapatan panen.
Sabtu 3-Agustus-2019	Pemberian materi tentang kerapatan panen	Aktivitas masih dilakukan di afdeling VIII, diskusi dengan asisten afdeling VIII di kantor oleh bapak Yudi Irfansyah, SP tentang kegiatan kerapatan panen selama di lapangan.
Minggu 4-Agustus-2019	Istirahat	

Senin 5-Agustus- 2019	Pemberian materi tentang tunas pasir di afdeling IV.	Kegiatan dilakukan dikantor afdeling IV di pandu oleh asisten afdeling IV bapak Suharmansyah, SP materi yang disampaikan tentang tunas pasir dan diarahkan ke mandor I.
Selasa 6-Agustus- 2019	Materi yang disampaikan semalam tentang tunas pasir	Aktivitas masih dilakukan di afdeling IV, diskusi dengan asisten afdeling IV di kantor oleh bapak Suharmansyah, SP tentang kegiatan tunas pasir selama di lapangan.
Rabu 7-Agustus- 2019	Materi yang disampaikan tentang pemanenan (TBM)	Kegiatan dilakukan dikantor afdeling IV di pandu oleh asisten afdeling IV bapak Suharmansyah, SP materi yang disampaikan tentang pemanenan (TBM) dan diarahkan ke mandor I dan dilanjutkan peninjauan lapangan.
Kamis 8-Agustus- 2019	Mengulas/membahas tentang materi semalam yaitu pemanenan (TBM)	Aktivitas masih dilakukan di afdeling IV, diskusi dengan asisten afdeling IV di kantor oleh bapak Suharmansyah, SP tentang kegiatan pemanenan (TBM) selama di lapangan.
Jumat 9-Agustus- 2019	Materi yang disampaikan tentang pemupukan di (TBM) melalui alat pemboboran.	Kegiatan dilakukan dikantor afdeling IV di pandu oleh asisten afdeling IV bapak Suharmansyah, SP materi yang disampaikan tentang pemupukan (TBM) dan diarahkan ke mandor I dan dilanjutkan peninjauan lapangan.

Sabtu 10-Agustus- 2019	Mengulas/membahas tentang materi semalam yaitu pemupukan (TBM).	Aktivitas masih dilakukan di afdeling IV, diskusi dengan asisten afdeling IV di kantor oleh bapak Suharmansyah, SP tentang kegiatan pemupukan (TBM) selama di lapangan.
Minggu 11-Agustus- 2019	Istirahat	
Senin 12-Agustus- 2019	Materi yang disampaikan tentang pengisian Data Tandan Buah (DTB) di afdeling VIII.	Aktivitas masih dilakukan di afdeling VIII yang disampaikan tentang kegiatan Data Tandan Buah (DTB) yang dipandu oleh mandor I afdeling VIII dan dilanjutkan peninjauan lapangan.
Selasa 13-Agustus- 2019	Mengulas/membahas tentang materi semalam yaitu Data Tandan Buah (DTB).	Aktivitas masih dilakukan di afdeling VIII, diskusi dengan asisten afdeling VIII di kantor oleh bapak Yudi Irfansyah, SP Data Tandan Buah (DTB) selama di lapangan.
Rabu 14-Agustus- 2019	Materi yang disampaikan tentang Media Pembiakan Jamur Cordycep di afdeling VIII.	Aktivitas masih dilakukan di afdeling VIII yang disampaikan Media Pembiakan Jamur Cordycep yang dipandu asisten afdeling VIII bapak Yudi Irfansyah, SP dan dilanjutkan peninjauan lapangan.
Kamis 15-Agustus- 2019	Mengulas/membahas tentang materi semalam yaitu Media Pembiakan Jamur Cordycep.	Aktivitas masih dilakukan di afdeling VIII, diskusi dengan asisten afdeling VIII di kantor oleh bapak Yudi Irfansyah, SP selama di lapangan.

Jumat 16-Agustus- 2019	Membantu/partisipasi penyambutan HUT RI	
Sabtu 17-Agustus- 2019	Ikut memeriahkan HUT RI (17 Agustus 2019)	
Minggu 18-Agustus- 2019	Istirahat	
Senin 19-Agustus- 2019 s/d 23- Agustus- 2019	Kegiatan yang dilakukan pembuatan laporan sekaligus revisi.	Kegiatan pemeriksaan laporan atau revisi diperiksa oleh asisten afdeling VIII bapak Yudi Irfansyah, SP dan ATSKA bapak Mugiyanto,SP dan sekaligus selesainya PKL (Praktek Kerja Lapangan).

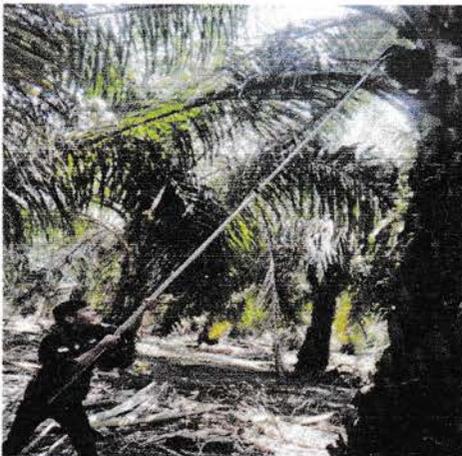
LAMPIRAN GAMBAR



Penyemprotan (Chemist)



Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)



Pemanenan



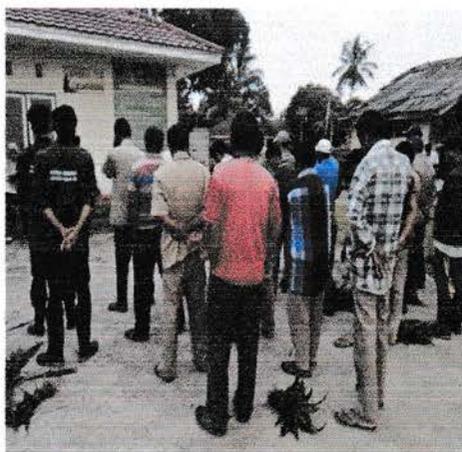
Penunasan (TM)



TBS yang berada di tempat pemungutan hasil (TPH)



Proses Pengangkutan



Apel pagi bersama para karyawan di Afdeling IV kebun sei kopas



Dosen pembimbing lapangan



Peta situasi Sei Kopas